



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN

JL. Gubernur H. Asnawi Mangku Alam
Bandara Int SMB II Palembang – 30961

TELP : 0711 – 571681

Email : bptd7sumselbabel@dephub.go.id
bptdsumsel
bptd_sumsel

Nomor : PR.202/1/3/BPTD SUMSEL Palembang, 5 Januari 2024
Klasifikasi : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah BPTD Kelas II Sumatera Selatan

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : PR.202/3/13/DJPD/2023 Tanggal 13 Desember 2023 perihal Penyusunan dan Pengumpulan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2023. Bersama ini dengan hormat terlampir disampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

Demikian disampaikan, atas perkenan dan arahan Bapak Sesditjen Hubdat kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai,



Denny Michels Adlan, S.T., M.M.
NIP. 19790205 200604 1 002

Tembusan :

Kepala Bagian Perencanaan, Setditjen Hubdat.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan
Tahun 2023

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Nur Ida Fitrianti	Penyusun Rencana dan Pelaporan	11/1 2024	
2.	Dikonsep	Liana Syaputri	Pengawas Lalu Lintas dan Angkutan Penyeberangan	11/1 2024	
2.	Diperiksa	Tulus Raharjo, A.TD.,M.Si.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	15/1 2024	
3.	Disetujui	Tulus Raharjo, A.TD.,M.Si.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	15/1 2024	
4.	Disetujui	Milfer Joneliy, S.Kom.,M.Si.	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	15/1 2024	
5.	Disetujui	Elba Iskandar, S.Sos., M.Si.	Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	15/1 2024	
6.	Disetujui	Herry Saputra, S.IT.,M.Si.	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan	15/1 2024	



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



L K I P

2023

TERMINAL TINGKIL

Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan RI

ditjen_hubdat

hubdat151



Ditjen Perhubungan Darat



hubdat.dephub.go.id

KATA PENGANTAR



BPTD Kelas II Sumatera Selatan mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat.

Sebagai institusi publik, BPTD Kelas II Sumatera Selatan bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Kinerja BPTD Kelas II Sumatera Selatan merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja BPTD Kelas II Sumatera Selatan yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPTD Kelas II Sumatera Selatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2023 serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja Tahun 2023.

Kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberikan penjelasan pertanggung jawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Palembang, 3 Januari 2024

Kepala Balai,



DENNY MICHELS ADLAN, S.T.,M.M.



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2023 merupakan tolak ukur instansi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan ini mencakup pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 dengan total jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 15 (Lima belas) Indikator dari 5 (lima) Sasaran Kegiatan.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas, BPTD Kelas II Sumatera Selatan telah melaksanakan dengan baik, dimana terdapat 13 (tiga belas) Indikator Kinerja yang lebih besar atau sama dengan 100% ($\geq 100\%$) dan 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq IKK < 100\%$)

Hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran yaitu sebesar 99,17%, dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi BPTD Kelas II Sumatera Selatan sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024.





BAB I PENDAHULUAN

BAB II
PERENCANAAN
KINERJA

BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA

BAB IV
PENUTUP



I.1 LATAR BELAKANG

I.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dituntut untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan dengan *Prudent*, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien sesuai dengan prinsip - prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga itu diperlukan Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraanya.



I.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tahun 2016 UPT Ditjen Darat sebelumnya, yaitu: Balai LLAJSDP, KOPP, Pelabuhan Penyeberangan dilebur dan disempurnakan nomenklaturnya untuk mengakomodir Pengelola Terminal Tipe A dan UPPKB menjadi 33 UPT Balai Pengelola Transportasi Darat. Dengan dasar hukum Peraturan Menteri Perhubungan No PM 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

Tipologi (BPTD) terdiri atas:

- a. BPTD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal tipe A, terminal untuk barang umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian, dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau, dan penyeberangan disebut BPTD Kelas I;
- b. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Kelas II;
- c. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik kepulauan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Tipe C;

Susunan Organisasi BPTD Kelas I terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Prasarana;
- c. Bidang Sarana dan Angkutan;
- d. Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi BPTD Kelas II terdiri atas:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
- c. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
- d. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi BPTD Kelas III terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional

I.2.1 Bagan Struktur Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat



I.3 Sumber Daya Manusia

Data sumber daya manusia pada satuan kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan pada tahun 2023 meliputi:

- A. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 189 Orang;
- B. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 12 Orang;
- C. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 4 Orang;
- D. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 256 Orang.

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
1	DENNY MICHELS ADLAN, S.T., M.M.	19790205 200604 1 002	Pembina (IV/a)
2	TULUS RAHARJO, A.TD., M.Si.	19680119 199301 1 001	Pembina (IV/a)
3	ELBA ISKANDAR, S.Sos., M.Si.	19681115 200701 1 005	Pembina (IV/a)
4	MILFER JONELIY, S.Kom., M.Si.	19760215 200701 1 019	Penata Tk.I (III/d)
5	HERRY SAPUTRA, S.Si.T., M.Si.	19851025 200902 1 002	Penata Tk.I (III/d)



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
6	NUR IDA FITRIANTI, S.SIT., M.SC	198705252010122001	Penata Tk.I (III/d)
7	INDRA BRILIAN, S.ST(TD)	198605172008121001	Penata (III/c)
8	HANDOYO WICAKSONO, , S.S.T (TD)	199205272015031001	Penata (III/c)
9	HUSNI THAMRIN, A.Md.	19760513 200812 1 001	Penata Muda Tk.I (III/b)
10	FIRDAUS, A.Md LLAJ	198602142009031006	Penata Muda Tk.I (III/b)
11	TRI SULISTYOWATI, SE, M.Si.	198405142009022007	Penata Muda Tk.I (III/b)
12	TRI JULIAN SARI, S.E.	199307272014022001	Penata Muda (III/a)
13	ZULHADI, S.T.	198701212015031007	Penata Muda (III/a)
14	ALDI RENALDI, A.MD. LLASDP	199406222020121012	Pengatur (II/c)
15	HABSARI AGUARISTI TAMA, A.Md	199102082018012001	Pengatur Tk.I (II/d)
16	DWI RAHMAWATI NUR AZIZAH, A.P.KB.N	200002102020012001	Pengatur Muda (II/a)
17	PRAYOGA SURYA PRATAMA, A.MD TRA	199807192021121001	Pengatur (II/c)
18	MOHAMAD SYARIF RAMADHAN, A.Md.	199812222022031005	Pengatur (II/c)
19	LIANA SYAPUTRI, A.Md.	199702012022032021	Pengatur (II/c)
20	ANITA DWI MARTINI, A.Md.Tra	199911282023022001	Pengatur (II/c)
21	ABDI PERMANA, A.Md.Tra	199909182022031003	Pengatur (II/c)
22	DEDY BANTORO, S.H.	199012262015031002	Penata Muda (III/a)
23	VAMZA ANFAQO, A.Md.Tra	20010809 202210 1 002	Pengatur (II/c)
24	ALYA NUR SAMSIYANI, A.Md.T.	19970717 202203 2 024	Pengatur (II/c)

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
25	ISSABELA SAFITRI, A.Md.	19990709 202203 2 016	Pengatur (II/c)
26	SRI YOSHI WAHYUNI, A.Md, LLASDP	199506172022032018	Pengatur (II/c)
27	ROISSATUL KAMILA, A.Md. Tra	200003132022032003	Pengatur (II/c)
28	M. RAMA FARHANSYAH, A.Md LLASDP	199810222022031007	Pengatur (II/c)
29	IRMA NURLIYA DINA, A.Md, LLASDP	19930117 202203 2 009	Pengatur (II/c)
30	RAFIKA OCTAVIANI	20020708 202310 2001	Pengatur (II/c)
31	ZUL AFNAN, S.H., M.Si.	198804182010011004	Penata (III/c)
32	HAFIZHUL ULYA SUMARNO, S.ST.	199805082020121004	Penata Muda (III/a)
33	YUNI FITRI YANTI, S.E., M.Si.	198706022015032002	Penata Muda Tk.I (III/b)
34	IQBAL RASYIDIN	199901152022032004	Pengatur Muda (II/a)
35	DIMAS RESHA YUDHISTIRA, A.Md LLAJ	199710172022031017	Pengatur (II/c)
36	DERA GADING TEGAR WIJAYA, S.Tr.Tra	199910272022101001	Penata Muda (III/a)
37	RIFIQI FADHILAH, S.Tr.Tra	199909232022101001	Penata Muda (III/a)
38	M. RIDUAN, A.MD LLASDP, S.M.	199301042015031002	Penata Muda (III/a)
39	DWI CHINDY ROCKY ANGELI SIAHAAN, A.Md Tra	199911022021122001	Pengatur (II/c)
40	MOH. EKO CAHYONO, S.T.	199610162022031008	Penata Muda (III/a)
41	RENALDY DIANTORO SUNARDI	20000619 202310 1 002	Penata Muda (III/a)
42	KHARISMA NUR ISMAWANTI	19991117 202310 2 001	Penata Muda (III/a)
43	MUHAMMAD ICHSAN, S.ST	199412212019021002	Penata Muda Tk.I (III/b)



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
44	LILI SURYAMAN, A.MD.TK., S.T.	198201312009121004	Penata Muda Tk.I (III/b)
45	TEUKU REZA MOENZIER, SH, MM	197909022000121003	Penata Tk.I (III/d)
46	RICO SAPUTRA, SH, M.SI	198602102010011018	Penata (III/c)
47	SEPTIANSAH, A.MD LLASDP, S.E., M.Si.	199009122014021003	Penata Muda Tk.I (III/b)
48	ADI TIA KRISNA SAPUTRA, A.MD. PKB	199210232018011001	Pengatur (II/c)
49	DIAN WIRA SAPUTRA, A.MD PKB	199109062020121004	Pengatur (II/c)
50	ENDAH APRILIA, A.Ma PKB	199804042021022001	Pengatur Muda Tk.I (II/b)
51	BHARA DHEWA KUSUMAH, S.Tr.Tra	200005112022101002	Penata Muda (III/a)
52	MUHAMMAD SAIFU ROHMAN, A.Md. Tra	199910172023021001	Pengatur (II/c)
53	IMAM ARIEFURRACHMAN, AMD LLASDP, ST	198610162009121002	Penata (III/c)
54	HANUM DWI OKTAVIA, A.MD.LLASDP, S.ST (TD)	199310112015032002	Penata Muda (III/a)
55	INTAN CAHYANINGTYAS, S.Tr.Pel	199706052022032016	Penata Muda (III/a)
56	DWI ANGGRAINI, A.MD.LLASDP	199307082015032003	Penata Muda (III/a)
57	LUTHFI FADHILAH, A.Md TRa	200006302021121002	Pengatur (II/c)
58	M. RAKEN AL ZUHRA, A.Md.T.	200203022022101001	Pengatur (II/c)
59	HALIM PUTU NUGROHO, A.Md.Tra	20010911 202210 1 001	Pengatur (II/c)
60	KHOIRUNNISA	20010609 202310 2 001	Pengatur (II/c)
61	ANJAS GUMELAR, A.Md LLASDP., S.S.T (TD)	199306122014021001	Penata Muda Tk.I (III/b)

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
62	SALVATORRY GILBERTH SANDOVA TP, A.MD.T	199912232021121001	Pengatur (II/c)
63	MUHAMMAD RODIATAMMARDHI, A.Md.	199607122022031007	Pengatur (II/c)
64	WENDHY OKUMURA SAPUTRA, S.T.	199004122011011001	Penata (III/c)
65	YOES MEARNI, A.Md	199605202020122005	Pengatur (II/c)
66	ILHAM ESO PERMANA, A.Md.	199705152022031011	Pengatur (II/c)
67	AKHMAD FAUZAN, S.Tr.Tra	199801042022031000	Penata Muda (III/a)
68	DESSY FADDHILA, A.Md	199012212014022008	Penata Muda (III/a)
69	OSMI ALINA SIMANJUNTAK, SE	19880724 202012 2 008	Penata Muda (III/a)
70	MONICA LISDAYANI BR SIBORO, A.Md T	19970103 202203 2 011	Pengatur (II/c)
71	SHEILLA FREDIANO, A.MD TRA	19990913 202112 1 001	Pengatur (II/c)
72	IKA AGUSTIN BR TARIGAN, A.Md.Tra	200108202 202210 2 001	Pengatur (II/c)
73	SEVTA PUJI LESTARI	19930930 202203 2 016	Pengatur (II/c)
74	ANISA SAVIRA PUTRI	20021002 202310 2 001	Pengatur (II/c)
75	SHINTA APRILIANI	20020416 202310 2 003	Pengatur (II/c)
76	EVA JUNITA SARI, A.Md PKB	19990630 202321 2 004	PPPK Gol. VII
77	INDRA AMANDO, A.Ma PKB		PPPK Gol. VI
78	INCENT OKTAFIA	19981010 202321 1 010	PPPK Gol. V
79	DEVINA JULIKA, SE		PPNPN
80	EKO SAPUTRA ISMUNANDAR, S.Sos		PPNPN
81	FADEL MUHAMMAD, S.Pd		PPNPN



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
82	HERNI NOVIANA, S.Sos		PPNPN
83	NYAYU ERIKA MIRANDA, S,E		PPNPN
84	RAHMAT LUFIE, S.Sn		PPNPN
85	SINDY PANGESTY, S.ST		PPNPN
86	SEPTRIA, A.Md		PPNPN
87	AFRILIANA PUSPITASARI		PPNPN
88	DINO RIZALDI		PPNPN
89	FAJRI SANTOSO		PPNPN
90	NURAINI		PPNPN
91	THOMAS SIGRO WASONO		PPNPN
92	TRI KARNO		PPNPN
93	SYAHRIL HIDAYAT		PPNPN
94	REZKY MANDALA PUTRA		PPNPN
95	YUNILA DEWI ROHMA, A.Md		PPNPN
96	YUNIA ADITRI, A.Md PKB		PPNPN
97	BIMA ARIF OKTIANTO,SPd., M.Si		PPNPN
98	IWAN SUTRISNO		PPNPN
99	INNES ASTITI, SE		PPNPN
100	FITRIA ANGGRAINI, ST		PPNPN
101	M. ALVIN NAHDY, SH		PPNPN
102	ACHMAD JAYADI HARJO, A.Md LLASDP		PPNPN
103	MUHAMMAD ASROL ISBAHUDDIN, S.ST		PPNPN

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe A mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penyelenggaraan Pelabuhan penyeberangan pada Pelabuhan yang di usahakan secara komersial dan Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPTD Tipe A menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
2. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;
3. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas, serta pengawasan tarif angkutan jalan;
4. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang komersial dan

The first part of the paper discusses the importance of the
 research and the objectives of the study. It also outlines the
 methodology used in the study and the data sources. The second
 part of the paper presents the results of the study and discusses
 the implications of the findings. The third part of the paper
 concludes the study and provides recommendations for future
 research.

The first part of the paper discusses the importance of the
 research and the objectives of the study. It also outlines the
 methodology used in the study and the data sources. The second
 part of the paper presents the results of the study and discusses
 the implications of the findings. The third part of the paper
 concludes the study and provides recommendations for future
 research.

Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administrative terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;

5. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

I.4.1 Profesi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan sebagai unsur pembantu pimpinan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan kepada pemerintah daerah. Tugas dan fungsi dimaksud meliputi koordinasi kegiatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, pembinaan dan pemberian dukungan di bidang transportasi darat. Potensi pengembangan pada bidang transportasi darat adalah sebagai berikut:

- a. Dalam fenomena perkembangan globalisasi, tingkat pelayanan transportasi darat akan terus diupayakan untuk memenuhi standar nasional maupun internasional sehingga meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global;
- b. Teknologi transportasi darat akan berpengaruh terhadap kapasitas angkut, fleksibilitas pergerakan, kecepatan waktu tempuh, dan bentuk serta kehematannya dalam mengkonsumsi bahan bakar;
- c. Dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan melalui kebijakan deregulasi akan memungkinkan meningkatnya peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan dana investasi yang dibutuhkan bagi

pembangunan infrastruktur transportasi darat, serta akan memperluas jangkauan;

- d. Dengan melakukan program pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan maka akan meningkatkan citra Pemerintah Indonesia dalam dunia internasional dan meningkatkan citra bangsa. Pembangunan transportasi darat berkelanjutan dapat dilakukan secara konsisten, misalnya mewajibkan melakukan studi amdal sebelum masa konstruksi bagi setiap program pembangunan transportasi darat yang telah disetujui pendanaannya. Selanjutnya dilakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pasca operasi secara berkala oleh Lembaga-lembaga yang telah ada. Pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah dapat disinergikan menjadi kekuatan yang efektif.

I.4.2 Isu Strategis

- a. Membangun Konektivitas Nasional untuk keseimbangan pembangunan

Infrastruktur penunjang konektivitas nasional baik berupa jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi, perlu diintegrasikan dengan pelayanan sarana intermodatransportasi yang terhubung secara efisien dan efektif.

Oleh karena itu mendorong pembangunan konektivitas antarwilayah, sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Penyediaan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan logistik, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat gerak ekonomi. Kebijakan strategis untuk mewujudkan konektivitasnasional :

1. Mempercepat pembangunan system transportasi multimoda;
2. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industry nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung Kerjasama regional dan global;
3. Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;

4. Membangun system dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri;
5. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan;
6. Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi;
7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas Lembaga pengembangan sumber daya manusia.

b. Membangun Transportasi Umum Massal Perkotaan

Pembangunan perkotaan Indonesia kedepan diarahkan pada peningkatan peran perkotaan sebagai basis pembangunan dan kehidupan yang layak huni, berkeadilan, mandiri, berdayasaing, dan berkelanjutan, sesuai dengan karakter potensidan budaya lokal.

Arah kebijakan pembangunan perkotaan pada berfokus pada pengembangan kota sebagai suatu kesatuan kawasan/wilayah, yaitu kota sebagai pendorong pertumbuhan nasional dan regional serta kota sebagai tempat tinggal yang berorientasi pada kebutuhan penduduk kota. Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan transportasi umum massal perkotaan, pembangunan sistem angkutan umum modern yang saling terintegrasi seperti BRT dan LRT diharapkan dapat meningkatkan peran angkutan umum dalam melayani kebutuhan perjalanan penduduk perkotaan serta menciptakan transportasi perkotaan yang praktis, efisien, ramah lingkungan, dan berkeadaban. Arah kebijakan dan strategi yang disusun lima tahun kedepan adalah :

1. Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu;

2. Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan;
3. Meningkatkan integrasi kelembagaan transportasi perkotaan.

1.4.3 Permasalahan

a. Permasalahan Transportasi Angkutan Jalan

1. Rendahnya kondisi pelayanan prasarana jalan akibat kerusakan di jalan, belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan, antarkota, perkotaan dan pedesaan.
2. Masih tingginya kerusakan jalan akibat pelanggaran muatan lebih di jalan yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi akibat dari :
 - a) Pengawasan melalui jembatan timbang belum optimal dikarenakan belum semua jembatan timbang beroperasi;
 - b) Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan akibat: disiplin pengguna jalan, rendahnya tingkat kelaikan armada; rambu dan fasilitas keselamatan di jalan; law enforcement peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas;
 - c) Masalah mobilitas, terutama rendahnya kelancaran distribusi angkutan jalan, akibat:
 - 1) Terbatasnya perkembangan kapasitas prasarana jalan dibandingkan dengan perkembangan armada di jalan;
 - 2) Optimalisasi penggunaan kapasitas jalan yang masih rendah, serta banyaknya daerah rawan kemacetan akibat penggunaan badan dan daerah milik jalan untuk kegiatan sosial ekonomi, pasar, parkir, dsb;
 - 3) Masalah keterjangkauan dan pemerataan pelayanan transportasi jalan; banyaknya pungutan dan retribusi di jalan yang membuat biaya angkut di jalan belum efisien;

3. Masalah peraturan dan kelembagaan, terutama :

- a) Belum terpadunya tatanan transportasi nasional dan wilayah;
- b) Masalah pendidikan dan *law enforcement* peraturan yang belum efektif dilihat dari tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas di jalan. Pelanggaran lalu lintas dibedakan menjadi pelanggaran muatan dan/atau dimensi, pelanggaran perijinan angkutan orang dan/atau barang, pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran kelengkapan dokumen, pelanggaran rambu. Masalah disiplin berlalu lintas juga merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- c) Masih terbatasnya pengembangan SDM di bidang LLAJ baik di tingkat regulator maupun operator, pembinaan usaha angkutan serta pengembangan teknologi sarana dan prasarana LLAJ yang lebih efisien dan ramah lingkungan;
- d) Masih tingginya dampak lingkungan (polusi udara dan suara) akibat kemacetan dan masih dominannya penggunaan lalu lintas kendaraan pribadi di jalan, terutama di wilayah perkotaan. Rendahnya kualitas dan kuantitas angkutan umum terutama transportasi perkotaan akibat belum berkembangnya keterpaduan rencana tata ruang dan transportasi perkotaan, kesadaran dan kemampuan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan transportasi, rendahnya disiplin masyarakat pengguna, profesionalitas aparat dan operator transportasi, tingginya tingkat kemacetan lalu lintas pada jam sibuk, serta rendahnya kualitas pelayanan transportasi umum.

a. Permasalahan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

1. Belum ada data yang lengkap mengenai peta alur pelayaran sungai danau;
2. Terbatasnya jumlah SDM sehingga pelaksanaan Monitoring dan Pengumpulan Data Transportasi SDP di daerah kurang optima;
3. Belum dilaksanakan penetapan kelas alur-pelayaran sungai dan danau sebagai batas wilayah administrasi dan pembagian kewenangan

- antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota;
4. Belum ada buku petunjuk-pelayaran di sungai dan danau.

b. Permasalahan Transportasi Perkotaan

1. Kurangnya panduan tentang penyelenggaraan transportasi perkotaan;
2. Kurangnya pemahaman terhadap penyelenggaraan transportasi perkotaan;
3. Kurang jelasnya kewenangan penanganan masalah transportasi perkotaan khususnya pada kawasan aglomerasi;
4. Masih belum terintegrasinya perencanaan tata ruang dengan transportasi;
5. Kemacetan lalu lintas;
6. Pelayanan angkutan umum belum memadai;
7. Pencemaran udara akibat kendaraan bermotor.

c. Permasalahan Keselamatan Transportasi Darat

1. Ada dua hal yang dihadapi di dalam bidang transportasi, yaitu kemacetan dan keselamatan. Kemacetan terjadi di kota-kota besar di Indonesia, sedangkan kecelakaan terjadi hampir di semua wilayah Indonesia;
2. Kurangnya koordinasi dengan instansi-instansi lain terkait dengan masalah keselamatan;
3. Belum lengkapnya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan keselamatan jalan;
4. Bidang keselamatan jalan belum mendapatkan perhatian yang lebih oleh pemerintah daerah sehingga program-program peningkatan keselamatan jalan belum berjalan dengan maksimal.

I.2 Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

I.2 Tugas Pokok dan Fungsi

- Bagan Struktur Organisasi
- I.3 Sumber Daya Manusia
- I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- I.5 Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis
 - Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023
- II.3 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2023
 - Uraian Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2023
 - Uraian Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2023
 - Uraian Revisi Perjanjian Kinerja III Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KERJA

- III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja
- III.2 Pengukuran Capaian Kinerja
- III.3 Realisasi Anggaran
 - III.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2023
 - III.3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023
 - III.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - III.3.4 Hambatan dan kendala

BAB IV PENUTUP

- IV.1 Penutup
 - IV.1.1 Ringkasan Capaian
- IV.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

LAMPIRAN

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023;
3. Rencana Aksi Tahun 2023;
4. Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2023;
5. Revisi Rencana Aksi I Tahun 2023;

6. Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2023;
7. Revisi Rencana Aksi II Tahun 2023;
8. Revisi Perjanjian Kinerja III Tahun 2023;
9. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2023;
10. Laporan Kegiatan Instansi Pemerintah Tahun 2022;
11. Draft Laporan Kegiatan Instansi Pemerintah Tahun 2023;
12. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023;
13. Lain – lain yang dianggap perlu.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

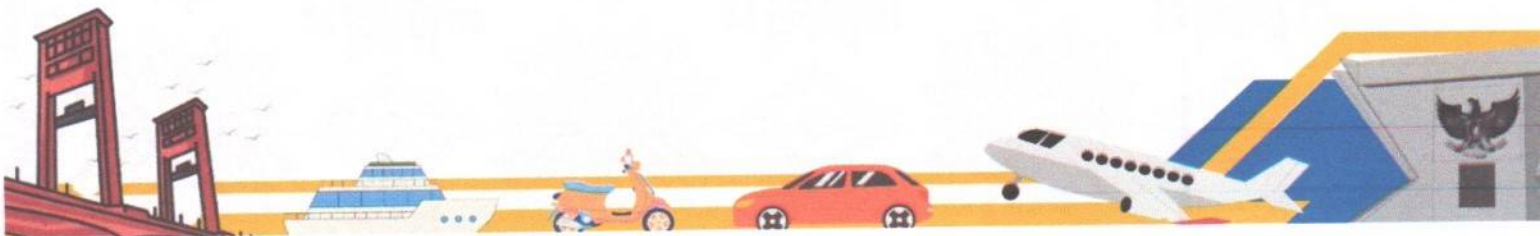
BAB IV PENUTUP



II.1 URAIAN SINGKAT PERENCANAAN STRATEGIS

II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020 – 2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program BPTD Kelas II Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2020 - 2024 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2020 – 2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Ditjen Hubdat.



Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, BPTD Kelas II Sumatera Selatan adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja program BPTD Kelas II Sumatera Selatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020 - 2024, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7
SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	100
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	60
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	10
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1200

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	1
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

II.1.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahunan BPTD Kelas II Sumatera Selatan merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Menteri Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2020 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran BPTD Kelas II Sumatera Selatan melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat.

Tabel II.2 Rencana Kinerja Tahunan

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	0
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7
		IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	1
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7
SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	100
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	60
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	10
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	0
		IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	400
		IKK3.6	Jumlah Fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)	Unit	0
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	96
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	67
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

II.2 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Sumatera Selatan merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Menteri Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2020 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran BPTD Kelas II Sumatera Selatan melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp. 147.894.726.000 ,- adalah sebagai berikut:

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	0
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7
		IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	1
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	60
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	10
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	0
		IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	400
		IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	0
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	96
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	67
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp 12.338.710.000,-
2	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 76.402.770.000,-
3	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 42.670.341.000,-
4	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 9.027.712.000,-
5	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 118.000.000,-
6	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 7.337.193.000,-
7	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 22.104.607.000,-

II.2.1 Uraian Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2023

Pada tahun berjalan terjadinya perubahan Kepala BPTD Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung serta terdapat IKK yang diubah karena mengalami typo dalam penulisan target maka dilakukan Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2023, yang sebagaimana dari Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2023 tersebut menyesuaikan dengan Rencana Strategis 2020 - 2024.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran BPTD Kelas II Sumatera Selatan melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp. 170.941.321.000,- adalah sebagai berikut :

Tabel II.4 Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A	Lokasi	7



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
			dan terminal barang yang beroperasi		
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	50
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	15
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	400
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayanan SDP	Lokasi	41
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

NO	KEGIATAN			ANGGARAN
1	Infrastruktur	Konektivitas	Transportasi	Rp 12.338.710.000,-

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 Dalam *Draft* Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan. Untuk mewujudkan 3 (tiga) tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024, bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2020-2024.

Tabel III. 1 Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2023

[illegible]

Selama tahun 2023, ada 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dan di dalamnya ada 15 (Lima Belas) IKK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan. Penjelasan capaian IKK untuk setiap Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut:

SK 1 MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT DAN KETERPADUAN ANTARMODA TRANSPORTASI

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang mempunyai peran dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan *Draft* Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Wil. VII Prov. Sumsel dan Prov. Babel direncanakan, dan dilaksanakan untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat umum. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan dalam IKK membangun negara sesuai dengan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 1.1 : Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional
2. IKK 1.2 : Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda.
3. IKK 1.3 : Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi.
4. IKK 1.4 : Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda
5. IKK 1.5 : Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan
6. IKK 1.6 : Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi

IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional**a.1. Definisi Indikator Kinerja**

Penyelenggaraan subsidi angkutan jalan perintis berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis. Ada dua kriteria untuk menetapkan angkutan jalan perintis, yaitu faktor finansial dan faktor keterhubungan. Kriteria faktor finansial berupa tingkat kemampuan daya beli masyarakat untuk aksesibilitas angkutan antardaerah masih rendah, trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah. Sedangkan kriteria faktor keterhubungan dapat berupa menghubungkan wilayah terisolasi dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani angkutan umum, menghubungkan daerah terpencil, terluar, dan tertinggal dengan wilayah yang sudah terbangun di wilayah Indonesia, melayani daerah yang terkena dampak bencana alam, dan melayani perpindahan penumpang dari Angkutan penyeberangan perintis atau Angkutan udara perintis.

Dalam hal pelayanan Angkutan Jalan Perintis untuk angkutan orang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki trayek tetap dan teratur;
- b. Sifat pelayanan tidak boleh terhenti;
- c. Tidak bersinggungan dengan trayek yang sudah dilayani oleh angkutan umum lainnya;
- d. Lokasi keberangkatan dan kedatangan berupa terminal, halte, atau fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antarmoda;
- e. Mencantumkan informasi trayek dan tarif pada terminal atau fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antarmoda;
- f. Memberikan pelayanan angkutan paling sedikit 1 keberangkatan dalam setiap hari; dan
- g. Menyediakan kendaraan cadangan paling sedikit 10% dari jumlah kendaraan yang dioperasikan.

Capaian kinerja persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan dihitung berdasarkan perbandingan persentase realisasi jumlah ritase dengan persentase target jumlah ritase tahun 2023 pada rute angkutan perintis sebagai berikut:

1. Terminal Simpang Periuk – Simpang 9 Cecar;
2. Terminal Simpang Periuk – Muara Rupit – Simpang Nibung;
3. Pangkal Pinang – Tanjung Pura;
4. Pangkal Pinang – Pusuk;
5. Tanjung Ru – Tanjung Pandan – Manggar; dan
6. Pangkal Pinang – Kretak – Koba.

$$\text{Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional} = \frac{\text{Persentase Realisasi Jumlah Ritase}}{\text{Persentase Target Jumlah Ritase}} \times 100$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2023

Realisasi kinerja persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional sebesar 100% jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 100%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.1. Grafik Capaian IKK persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional.



Gambar III. 1 Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 8613 Tahun 2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2023, sebanyak 6 (enam) trayek ditetapkan untuk dilayani Angkutan Jalan Perintis di Provinsi Sumsel dan Provinsi Babel.

Hakekat pemberian subsidi bagi angkutan perintis adalah lokasi pelayanan untuk menghubungkan antara daerah terisolir, terpencil dan tertinggal. Di lokasi tersebut tidak ada penyelenggaraan layanan transportasi lainnya dan secara aspek bisnis belum atau tidak menguntungkan.

Melalui penyelenggaraan angkutan jalan perintis diharapkan dapat mengembangkan potensi perekonomian daerah. Keberadaan bus keperintisan sangat penting dan diharapkan oleh masyarakat di daerah pedalaman yang belum terjangkau angkutan umum secara optimal. Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional Tahun 2023 memiliki persentase capaian sebesar 100% yang menunjukkan bahwa realisasi indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional pada Tahun 2023 berdampak pada terlayannya aksesibilitas transportasi

darat yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang dilalui trayek angkutan perintis di Prov. Sumsel dan Prov. Babel.

Dari layanan pelaksanaan keperintisan angkutan jalan di Prov. Sumsel dan Prov. Babel Tahun 2023 diketahui bahwa:

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah Realisasi Ritase s.d Tahun 2023} \\ &= \frac{5.040}{\text{Jumlah Target Ritase Tahun 2023}} \times 100 \\ & \quad 5.040 \end{aligned}$$

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional Tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Adapun realisasi anggaran dukungan terhadap Kegiatan Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional Tahun Anggaran 2023 per 31 Desember 2023 telah terealisasi sebanyak Rp. 6.697.495.000,- dari total pagu sebesar Rp. 6.697.495.000,- atau sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Subsidi operasional angkutan perintis jalan Provinsi Sumatera Selatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.977.459.000,- dan realisasi s/d 31 Desember 2023 mencapai Rp. 1.977.459.000,- atau 100%;
2. Subsidi operasional angkutan perintis jalan Provinsi Bangka Belitung dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 4.720.036.000,- dan realisasi s/d 31 Desember 2023 mencapai Rp. 4.720.036.000,- atau 100%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Dari hasil capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2023 yang menunjukkan realisasi capaian kinerja maupun keuangan yang baik ini, namun BPTD Kelas II Sumatera Selatan akan terus meningkatkan kinerja pelaksanaan keperintisan angkutan jalan melalui:

1. Perencanaan yang komprehensif dalam menentukan rute / trayek angkutan perintis di Provinsi Sumatera Selatan dengan memperhatikan RPJMN, Renstra serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan angkutan perintis di lapangan;
2. Komitmen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam kegiatan peningkatan konektivitas transportasi darat terutama di daerah-daerah terisolir dan belum terlayani angkutan umum;

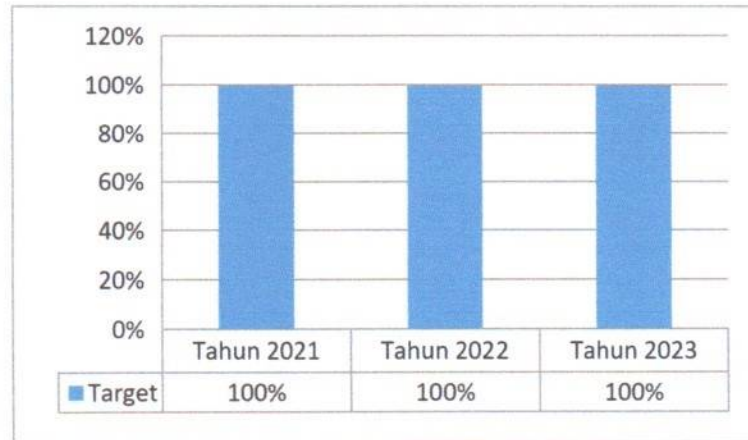
3. Terus berupaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar yang dilalui oleh rute angkutan keperintisan;
4. Melaksanakan monitoring efektifitas pelaksanaan angkutan jalan perintis secara mandiri.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

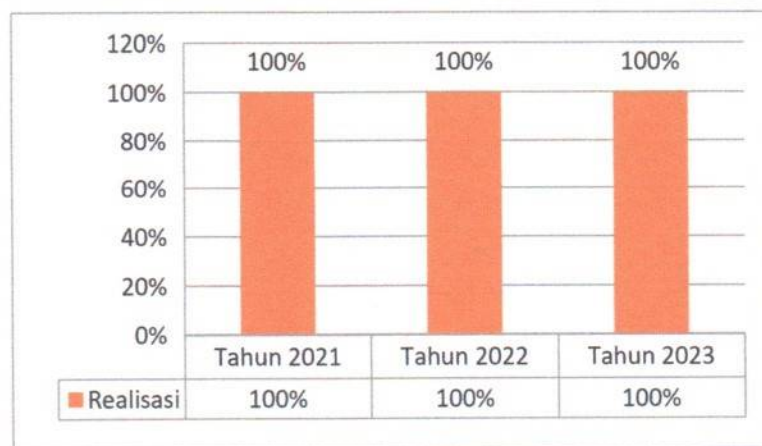
Realisasi kinerja persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Capaian kinerja Tahun 2023 ini mempunyai presentase yang sama dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 sebesar 100%, sehingga capaian kinerja tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.2 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023

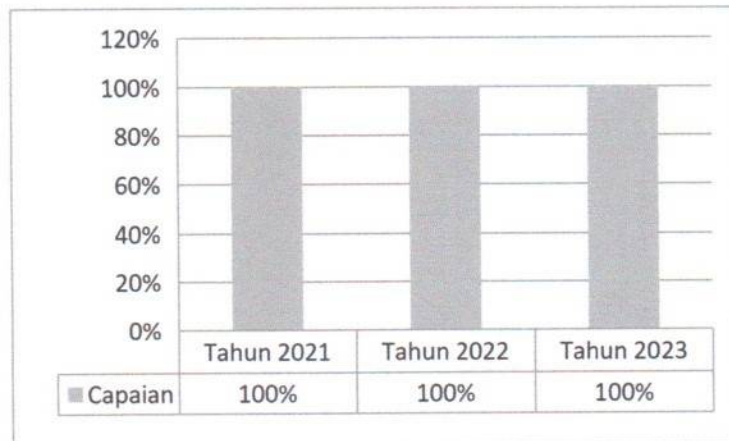
No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Naik/ Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi											
1	IKK 1.1 persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan



Gambar III. 2 Perbandingan Target Kinerja Pada Tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023



Gambar III. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja Pada Tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023



Gambar III. 4 Perbandingan Capaian Kinerja Pada Tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Revisi Renstra BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

Capaian kinerja persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Revisi Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada:



Gambar III. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Revisi Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

IKK 1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Simpul transportasi nasional terdiri dari Terminal Tipe-A, Bandar Udara, Stasiun KA, dan Pelabuhan. Pada tahun 2022, terdapat 2 (dua) trayek angkutan jalan yang melayani Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) berdasarkan SK Dirjen Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 9842 Tahun 2022 tentang Jaringan Trayek Angkutan Jalan pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Tahun 2023 meliputi: 1) Tanjung Pandan – Membalong, dimana pada trayek ini melewati simpul transportasi berupa Terminal Tipe B Tanjung Pandan; 2) Pusat Kota (Pangkal Pinang) – Desa Batu – Batu Beriga – (Bangka Tengah).

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda dengan satuan ukur jumlah lokasi digunakan rumus sebagai berikut:

= Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2023

Realisasi kinerja Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda sebesar 1 lokasi jika dibandingkan dengan target PK 2023 sebesar 1 lokasi, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.6. Grafik Capaian IKK Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda.



Gambar III. 6 Grafik Capaian IKK Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan SK Dirjen Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 9842 Tahun 2022 tentang Jaringan Trayek Angkutan Jalan pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Tahun 2023, BPTD Kelas II Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan subsidi angkutan antarmoda pada trayek 1) Tanjung Pandan – Membalong, dan 2) Pusat Kota (Pangkal Pinang) – Desa Batu – Batu Beriga – (Bangka Tengah).

Trayek ini melayani pergerakan masyarakat yang menggunakan angkutan antarmoda pada lokasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Kelayang di Kabupaten Belitung.

Dari pelaksanaan Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda diketahui bahwa:

= Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda

Adapun anggaran terkait Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda Tahun 2022 sebesar Rp. 2.123.522.000,- dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp. 2.123.522.000,- atau mencapai 100%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Perencanaan yang komprehensif dalam menentukan lokasi angkutan antarmoda di dengan memperhatikan RPJMN dan Renstra;
2. Komitmen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam kegiatan peningkatan pelayanan angkutan antarmoda terutama di lokasi-lokasi yang menjadi prioritas nasional (PN);
3. Melaksanakan monitoring efektifitas pelaksanaan secara mandiri.

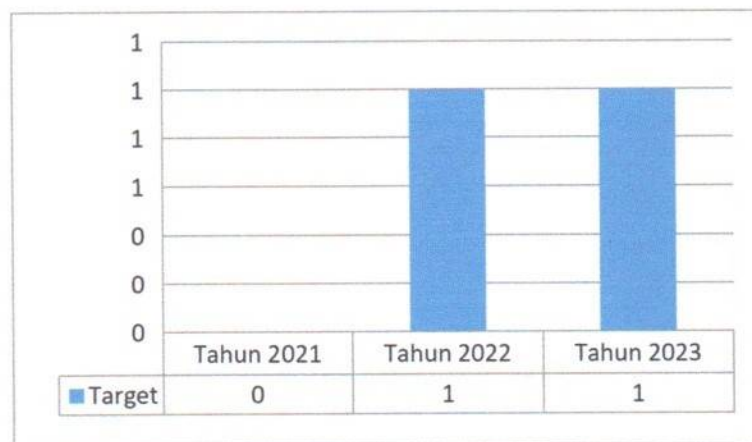
a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023

Realisasi kinerja Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda Tahun 2023 sebesar 1 Lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 sebesar 1 Lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%, sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2021 capaian kinerja sebesar 0 dengan target 0 dan pada tahun 2022 capaian kinerja Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda sebesar 1 Lokasi dengan target 1 Lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 dan mengalami kondisi tetap dibandingkan dengan

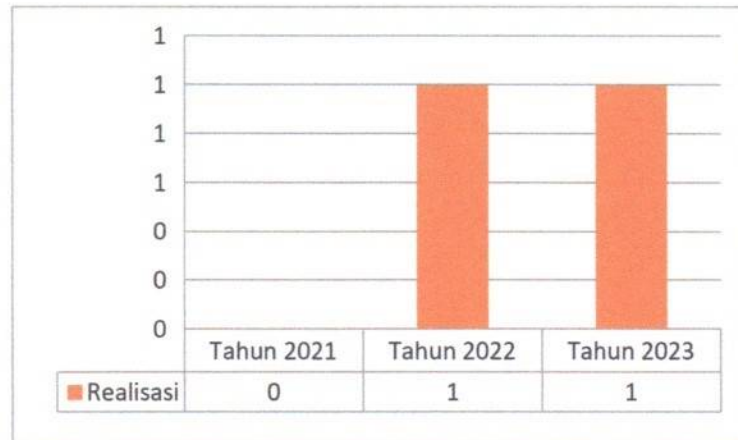
capaian kinerja tahun 2022. Untuk rincian capaian pada Tahun 2021, 2022, dan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III. 3 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Naik/ Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi											
1	IKK 1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi	0	0	100%	1	1	100%	1	1	100%	Naik & Tetap



Gambar III. 7 Perbandingan Target Kinerja Pada Tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023



Gambar III. 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Pada Tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023



Gambar III. 9 Perbandingan Capaian Kinerja Pada Tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

Capaian kinerja Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda sebesar 1 Lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2023 dalam Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 sebesar 1 Lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda Tahun 2023.



Gambar III. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024.

IKK 1.3. Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Terminal Tipe-A yang beroperasi merupakan Terminal Tipe-A yang telah selesai dibangun dan telah beroperasi. Sedangkan, Terminal Barang yang beroperasi merupakan Terminal Barang yang telah selesai dibangun dan telah melayani angkutan barang di jalan. Terminal Tipe-A adalah Terminal Tipe-A yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui BPTD Kelas II Sumatera Selatan.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi dengan satuan ukur jumlah lokasi digunakan rumus sebagai berikut:

$$= \text{Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi}$$

Pada BPTD Kelas II Sumatera Selatan terdapat 7 (tujuh) Terminal Tipe A yang beroperasi dan tidak terdapat terminal barang. Adapun 7 (tujuh) Terminal Tipe A tersebut, antara lain:

- a. Terminal Tipe A Alang-alang Lebar (Kota Palembang);
- b. Terminal Tipe A Karya Jaya (Kota Palembang);
- c. Terminal Tipe A Betung (Kab. Banyuasin);
- d. Terminal Tipe A Kayu Agung (Kab. OKI);
- e. Terminal Tipe A Batu Kuning (Kab. OKU);
- f. Terminal Tipe A Batai (Kab. Lahat); dan
- g. Terminal Tipe A Simpang Periuk (Kota Lubuklinggau).

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2023

Capaian kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi Tahun 2023 sebanyak 7 Lokasi jika dibandingkan dengan target PK 2023 sebesar 7 Lokasi, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.11.



Gambar III. 11 Grafik Capaian IKK Rasio Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, BPTD Kelas II Sumatera Selatan memiliki 7 (tujuh) Terminal Tipe-A yang akan dioperasikan meliputi:

1. Terminal Karya Jaya (Kota Palembang);

2. Terminal Kayu Agung (Kab. Ogan Komering Ilir);
3. Terminal Batu Kuning (Kab. Ogan Komering Ulu);
4. Terminal Simpang Periuk (Kota Lubuk Linggau);
5. Terminal Alang-Alang Lebar (Kota Palembang);
6. Terminal Lahat (Batay);
7. Terminal Betung (Kab. Banyuasin).

Sampai dengan Tahun 2023 Jumlah Terminal sesuai dengan yang ditetapkan dalam PM 6 Tahun 2023 sebanyak 7 (Tujuh) Terminal. Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi pada Tahun 2023 memiliki persentase capaian sebesar 100%, dimana hal ini menunjukkan bahwa realisasi indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan Indikator Kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi pada Tahun 2023 didukung dengan kegiatan operasional layanan Terminal Tipe-A yang melayani para penumpang yang ingin menggunakan jasa layanan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), dan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi pada Tahun 2023 memiliki persentase capaian sebesar 100%. Adapun realisasi anggaran pada Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi Tahun Anggaran 2023 per 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 12.729.856.841,- dari total pagu sebesar Rp. 12.730.121.000,- atau sebesar 100%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Dari hasil capaian kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi Tahun 2023 yang menunjukan realisasi capaian kinerja maupun keuangan yang sangat baik, BPTD Kelas II Sumatera Selatan akan terus meningkatkan kinerja pelaksanaan operasionalisasi Terminal Tipe A secara optimal. Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Perencanaan yang komprehensif dalam menentukan alokasi kegiatan operasional terminal tipe A sesuai dengan kebutuhan anggaran dengan memperhatikan RPJMN dan Renstra;

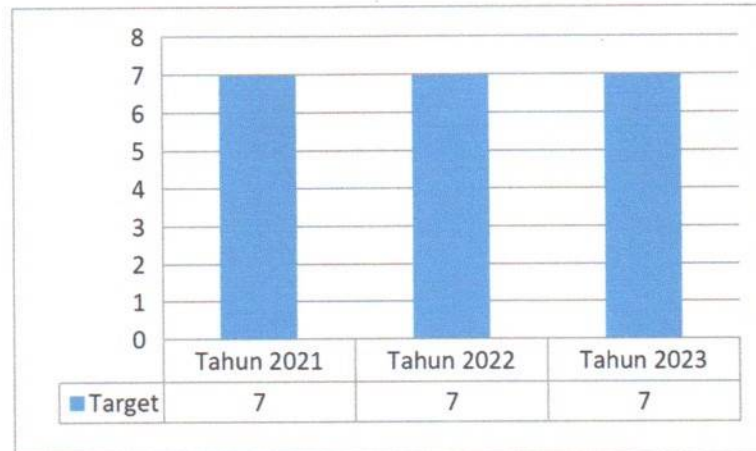
2. Perbaikan penyelenggaraan operasi Terminal Tipe A baik berupa dukungan sarana maupun prasarananya;
3. Meningkatkan kinerja pelaksanaan operasional terminal tipe A secara optimal;
4. Terus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk naik Bus di Terminal.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

Realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe-A yang beroperasi Tahun 2023 sebesar 7 Lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2023 sebesar 7 Lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%, sedangkan pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 capaian kinerja Jumlah Terminal Tipe-A yang beroperasi sebesar 7 Lokasi dengan target 7 Lokasi, maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada Tahun 2023 mengalami kondisi tetap dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 dan Tahun 2022 yaitu sebesar 7 Lokasi. Untuk rincian capaian pada Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.4 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023

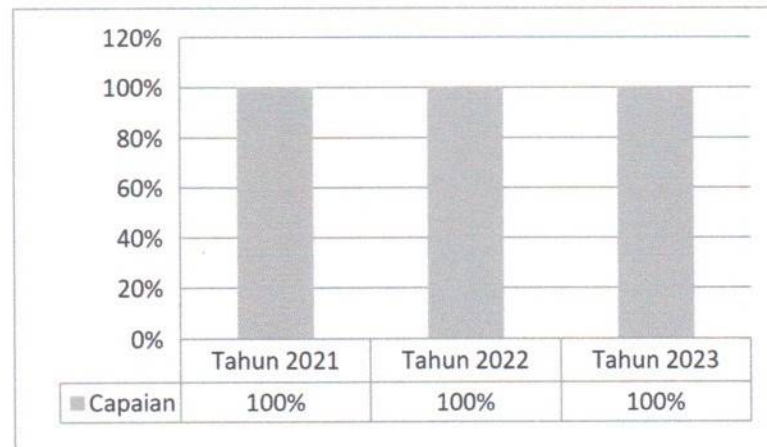
No.	Indikator Kinerja Program	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Naik/ Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi											
1	IKK 1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	7	7	100%	7	7	100%	7	7	100%	Tetap



Gambar III. 12 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023



Gambar III. 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023



Gambar III. 14 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

Capaian kinerja Jumlah Terminal Tipe-A yang beroperasi Tahun 2023 sebesar 7 Lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2023 dalam Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 sebesar 7 Lokasi, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.15. Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi Tahun 2023 terhadap target kinerja pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024.



Gambar III. 15 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan merupakan pelayanan angkutan penyeberangan perintis dengan jumlah daerah tertinggal, terpencil dan terluar, dimana pelaksanaan keperintisan angkutan penyeberangan ini terdapat pada lintas Tanjung Ru-Tanjung Nyato. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah trip yang

dilayani angkutan penyeberangan perintis per tahun dengan jumlah trip yang direncanakan pada tahun (n).

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan dengan satuan ukur persentase digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK\ 1.5 = \frac{\text{Jumlah trip yang dilayani angkutan penyeberangan perintis per tahun}}{\text{Jumlah trip yang direncanakan pada tahun (n)}} \times 100\%$$

Keterangan:

Trip yang dilayani angkutan penyeberangan adalah 1 kali perjalanan dari titik A ke titik B (1 trip), dimana jumlah trip yang direncanakan dalam 1 tahun ialah 660 trip.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2023

Realisasi kinerja persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan Tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 100%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.21. Grafik Capaian Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan.



Gambar III. 21 Grafik Capaian Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan tercapainya indikator Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan yaitu terlaksananya pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan di daerah tertinggal, terpencil dan terluar. Realisasi kinerja kegiatan ini pada BPTD Kelas II Sumatera Selatan yaitu terlayannya masyarakat pada lintas Tanjung Ru-Tanjung Nyato yang dilayani oleh KMP. Lean Puri sehingga masyarakat dapat melakukan mobilisasi dengan baik.

Adapun anggaran kegiatan pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan Tahun 2023 senilai Rp. 3.151.649.000,- dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp. 3.776.508.421,- atau mencapai 100%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. perencanaan yang komprehensif dalam menentukan waktu pelaksanaan kegiatan; dan waktu penyerapan anggaran dalam tahun berjalan dengan memperhatikan RPJMN dan Renstra;
2. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan;
3. Sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan di daerah yang terlayani angkutan penyeberangan.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

Realisasi kinerja Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2023 dalam Revisi Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 sebesar 100%, maka capaian kinerja mencapai 100%, sedangkan pada tahun sebelumnya Tahun 2021 dan Tahun 2022 capaian kinerja Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan sebesar 100% dengan target 100%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada Tahun 2023 tetap dibandingkan pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 yaitu 100%. Untuk rincian capaian pada Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

Tabel III.6 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023

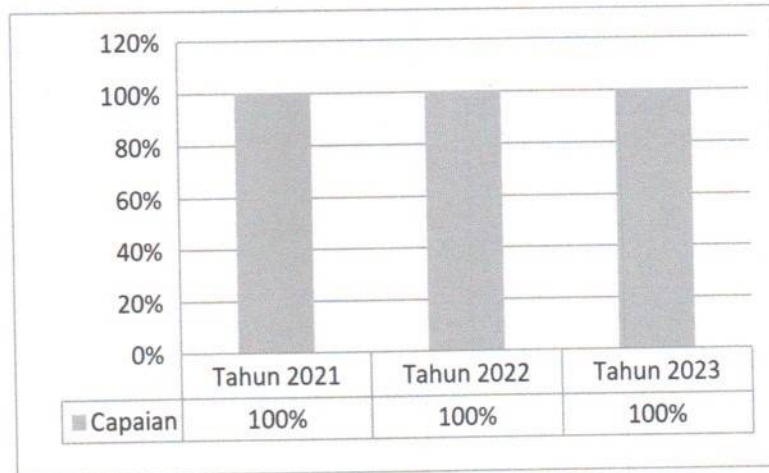
No.	Indikator Kinerja Program	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi											
1	IKK.1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tetap



Gambar III. 22 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023



Gambar III. 23 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023



Gambar III. 24 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Revisi Renstra BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

Capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2023 dalam Revisi Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 sebesar 100%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.25.



Gambar III. 25 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Revisi Renstra BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

IKK 1.6. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan adalah Pelabuhan penyeberangan kelas I, kelas II, dan kelas III. Sedangkan, Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpul dan pengumpan. Pelabuhan SDP yang beroperasi merupakan Pelabuhan SDP yang dibangun melalui APBN.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi dengan satuan ukur jumlah lokasi digunakan rumus sebagai berikut:

= Jumlah Pelabuhan SDP yang telah selesai dibangun dan dioperasikan s.d tahun (n)

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2023

Realisasi kinerja Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi Tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) Lokasi, jika dibandingkan dengan target Revisi III PK Tahun 2023 sebesar 3 (tiga) Lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.26.



Gambar III. 26 Grafik Capaian Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi



a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana telah diubah pada tanggal 21 Februari 2023 menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, dimana semula BPTD yang terbentuk ialah BPTD Wilayah VII Prov. Sumsel dan Prov. Babel yang melaksanakan operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebanyak 7 (tujuh) lokasi diubah menjadi BPTD Kelas II Sumatera Selatan yang melaksanakan operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebanyak 3 (tiga) lokasi sebagai berikut:

No.	Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi Pada BPTD Wil. VII Prov. Sumsel dan Prov. Babel (PM 20 Tahun 2018)	Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi Pada BPTD Kelas II Sumatera Selatan (PM 6 Tahun 2023)
	Jumlah Pelabuhan sebanyak 7 (Tujuh) Lokasi, antara lain:	Jumlah Pelabuhan sebanyak 3 (Tiga) Lokasi, antara lain:
1.	Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api;	Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api;
2.	Pelabuhan Penyeberangan Sadai;	-
3.	Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Ru (Nomenklatur dalam PM 154 Tahun 2016 Pelabuhan Tanjung Rui, namun setelah peninjauan lapangan nomenklatur disesuaikan menjadi Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Ru);	-
4.	Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kalian (Nomenklatur dalam PM 154 Tahun 2016 Pelabuhan Muntok, namun setelah peninjauan lapangan nomenklatur disesuaikan menjadi Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kalian).	-
5.	Pelabuhan Sungai 35 Ilir;	Pelabuhan Sungai 7 Ulu;
6.	Pelabuhan Penyeberangan Sri Menanti (Penambahan lokasi pelabuhan yang dianggarkan untuk dioperasikan	Pelabuhan Penyeberangan Sri Menanti

No.	Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi Pada BPTD Wil. VII Prov. Sumsel dan Prov. Babel (PM 20 Tahun 2018)	Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi Pada BPTD Kelas II Sumatera Selatan (PM 6 Tahun 2023)
	dalam DIPA/POK Awal BPTD Wilayah VII Prov. Sumsel dan Prov. Babel Tahun 2023)	
7.	Pelabuhan Tanjung Nyato (Penambahan lokasi pelabuhan yang dianggarkan untuk dioperasikan dalam DIPA/POK Awal BPTD Wilayah VII Prov. Sumsel dan Prov. Babel Tahun 2023)	-

Sumber: BPTD Kelas II Sumatera Selatan

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi pada Tahun 2023 memiliki persentase capaian sebesar 100%. Adapun realisasi anggaran dukungan terhadap Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Tahun Anggaran 2023 per 31 Desember 2023 telah terealisasi sebanyak Rp. 3.776.508.421,- dari total pagu sebesar Rp. 3.776.593.000,- atau sebesar 100%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Pada Tahun 2023, kegiatan operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan telah didukung dengan anggaran untuk 7 (tujuh) lokasi. Dari hasil capaian kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Tahun 2023 menunjukkan realisasi capaian kinerja maupun keuangan yang cukup baik, BPTD Kelas II Sumatera Selatan akan terus meningkatkan kinerja pelaksanaan operasionalisasi Pelabuhan SDP secara optimal dan juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan baik melalui revitalisasi/rehabilitasi maupun peningkatan sarana prasarana pendukung layanan Pelabuhan SDP.

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Perencanaan yang komprehensif dalam menentukan waktu pelaksanaan kegiatan dan waktu penyerapan anggaran dalam tahun berjalan dengan memperhatikan RPJMN dan Renstra;

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Revisi Renstra BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

Capaian kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Tahun 2023 sebesar 3 (tiga) Lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2023 dalam Revisi Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 sebesar 3 (tiga) lokasi, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.30.



Gambar III. 30 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Revisi Renstra BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

SK 2

MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT

Pencapaian Sasaran Kegiatan meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

IKK 2.1: Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A;

IKK 2.2: Persentase penerapan SMART terminal tipe-A; dan

IKK 2.3: Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP.

IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A

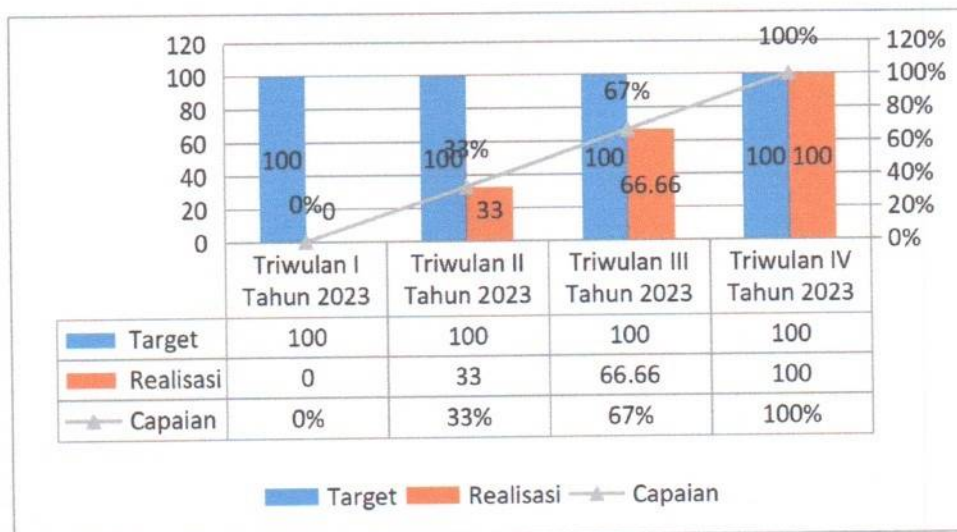
a.1. Definisi Indikator Kinerja

Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kehandalan/keteraturan, pelayanan kenyamanan, pelayanan kemudahan/keterjangkauan, pelayanan kesetaraan. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A dihitung dari pemenuhan jumlah nilai indikator jenis pelayanan Terminal Tipe A terhadap jumlah total nilai indikator jenis pelayanan Terminal Tipe A pada standar pelayanan. Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A dengan satuan ukur persentase digunakan rumus:

$$= \frac{\text{Jumlah Nilai Indikator Jenis Pelayanan Terminal Tipe A yang memenuhi SP}}{\text{Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (SP)}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2023

Realisasi Capaian Indeks Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 100%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.31.



Gambar III. 31 Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Sesuai PM 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, capaian kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A sudah dapat terealisasi di Tahun 2023, dimana pemenuhan SPM di Terminal Tipe A di Provinsi Sumatera Selatan telah memenuhi SPM pada salah satu jenis pelayanan yang terdapat pada seluruh aspek pelayanan yaitu 1) pelayanan keselamatan, (2) pelayanan keamanan, (3) pelayanan kehandalan/keteraturan, (4) pelayanan kenyamanan, (5) pelayanan kemudahan atau keterjangkauan, (6) pelayanan kesetaraan. Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A pada Tahun 2023 memiliki capaian kinerja sebesar 100% dikarenakan keenam aspek pelayanan telah terpenuhi di salah satu Terminal Tipe A yaitu Terminal Tipe A Alang-alang Lebar di Kota Palembang.

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A pada Tahun 2023 memiliki persentase capaian sebesar 100%. Adapun realisasi anggaran dukungan terhadap kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A per 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 12.729.856.841,- dari total pagu sebesar Rp. 12.730.121.000,- atau sebesar 100%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu perencanaan yang komprehensif dalam penganggaran dan prioritas alokasi penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang di terminal tipe A yang dapat memberikan nilai tambah pada standar pelayanan minimal yang belum optimal dipenuhi pada seluruh aspek pelayanan.

1. Perbaikan penyelenggaraan operasional Terminal Tipe A baik berupa dukungan sarana dan prasarannya;
2. Melaksanakan perbaikan sistem informasi terminal secara digital berupa *ticketing online*, maupun informasi keberangkatan dan kedatangan bus di terminal secara *online*;
3. Melaksanakan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat untuk naik bus di terminal.

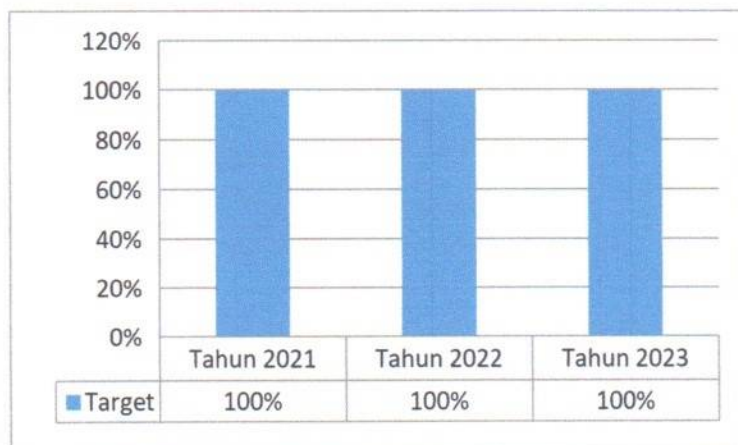
a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2023 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%, sedangkan pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A sebesar 100% dengan target 100%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada Tahun 2023 mengalami kondisi tetap. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.8 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat											
1	IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum di	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tetap

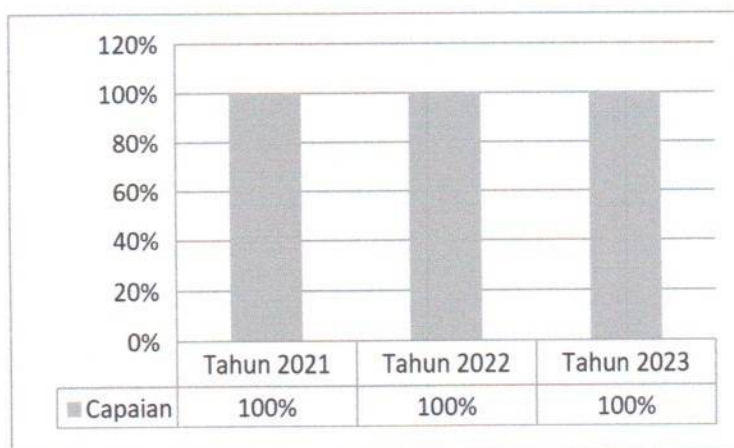
terminal tipe-A										
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Gambar III. 32 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023



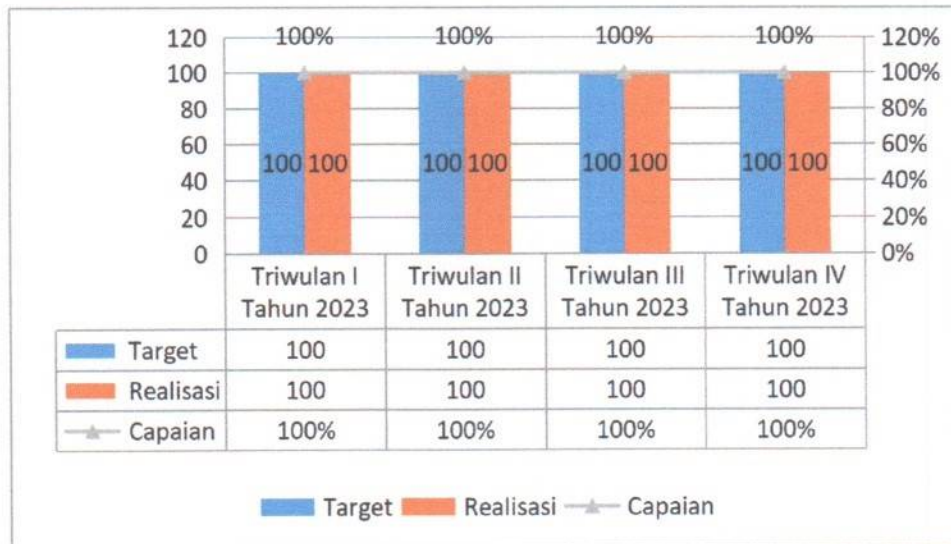
Gambar III. 33 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023



Gambar III. 34 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Revisi Renstra BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

Capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2023 dalam Revisi Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 sebesar 100%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.35.



Gambar III. 35 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Revisi Renstra BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

IKK 2.2 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A merupakan perbandingan antara persentase jumlah Terminal Tipe A yang berada di Provinsi Sumatera Selatan yang melaporkan data operasional terminal secara *online* (bobot 50%) ditambah dengan persentase jumlah Terminal Tipe A yang berada di Provinsi Sumatera Selatan yang telah dipasang perangkat digitalisasi terminal (bobot 50%). Perangkat digitalisasi yang berada di Terminal Tipe A dapat berupa *vending machine*, *passenger barrier gate*, *vehicle barrier gate*, *CCTV*, *counting passenger*, *information display*.

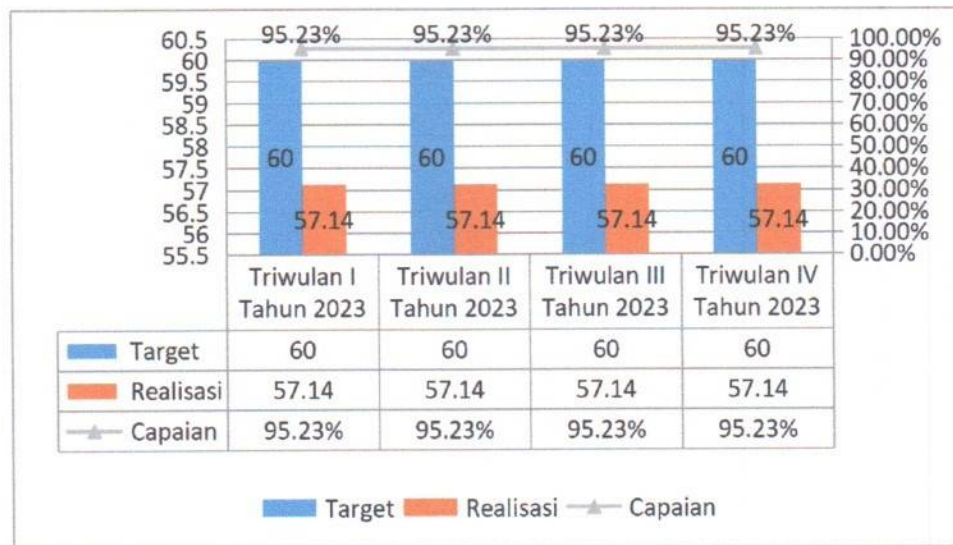
Persentase TTA Online

$$= \frac{\text{Jumlah Terminal yang melaporkan operasional nya secara online}}{\text{Jumlah Total Terminal Beroperasi}} \times 100\%$$

$$IKK\ 2.2 = (\text{Persentase TTA online} \times 50\%) + \left(\frac{\text{Persentase TTA yang telah dipasang}}{\text{perangkat digitalisasi Terminal} \times 50\%} \right)$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2023

Realisasi Capaian Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A Tahun 2023 sebesar 57,14% jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 60% maka capaian kinerja mencapai 95,23%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.36.



Gambar III. 36 Grafik Capaian IKK Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A Tahun 2022

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Dari 7 (tujuh) terminal yang berada di Provinsi Sumatera Selatan telah melaporkan operasionalnya secara *online* sehingga diperoleh bobot persentase sebesar 50%. Untuk persentase Terminal Tipe A (TTA) yang telah dipasang perangkat digitalisasi terminal hanya 1 (satu) terminal saja yaitu Terminal Alang-alang Lebar berupa CCTV dengan perolehan persentase sebesar 7,14% ($1/7 \text{ terminal} \times 100\% \times 50\%$), sehingga total persentase indikator kinerja Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A adalah 57,14% ($50\% + 7,14\%$).

Adapun anggaran pelaksanaan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A ini senilai Rp.15.301.363.000,- dengan realisasi hingga 31 Desember 2023 senilai Rp. 15.301.359.664,- atau mencapai 100%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu perencanaan yang komprehensif dalam menentukan alokasi kebutuhan anggaran dan perencanaan yang dilengkapi data dukung serta dengan memperhatikan RPJMN dan Renstra.

1. Perbaikan penyelenggaraan operasional Terminal Tipe A baik berupa dukungan sarana dan prasarannya;
2. Melaksanakan perbaikan sistem informasi terminal secara digital;
3. Melaksanakan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat untuk naik bus di terminal.

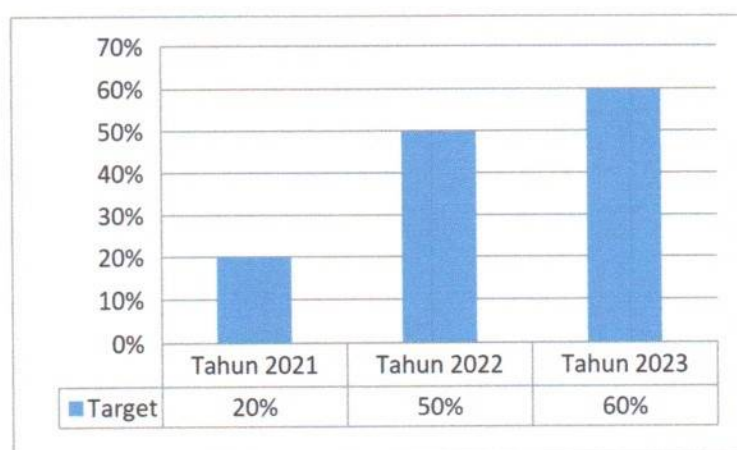
BPTD Kelas II Sumatera Selatan akan terus meningkatkan kinerja pelaksanaan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A melalui pembiayaan operasional Terminal Tipe-A yang dikelola karena pelayanan operasional Terminal Tipe-A berdampak pada terlaksananya pelayanan transportasi darat yang memenuhi kebutuhan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan dengan upaya peningkatan pelayanan berupa modernisasi sistem pelayanan transportasi darat (pengembangan sistem informasi berbasis digital dan penerapan pelayanan berbasis teknologi) di tahun-tahun yang akan datang.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

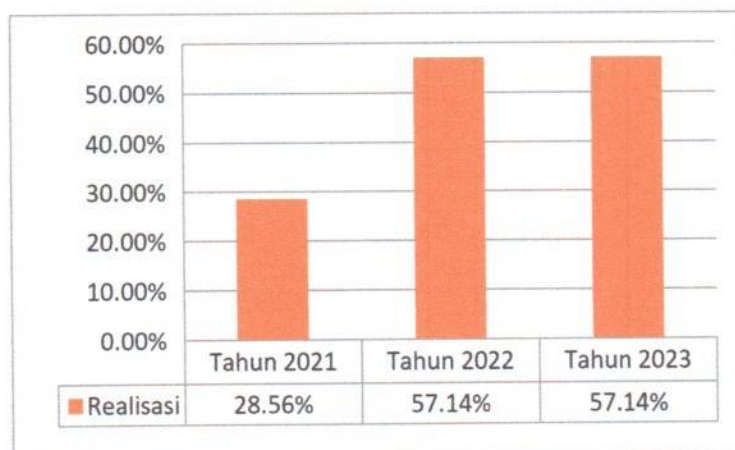
Realisasi kinerja Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A Tahun 2023 sebesar 57,14% jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2023 dalam sebesar 60%, maka capaian kinerja mencapai 95,23%, sedangkan pada Tahun 2021 capaian kinerja sebesar 142,80% dengan target 20%, untuk Tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 57,14% dengan target 50% maka capaian kinerja mencapai 114,28%. Jadi realisasi pada Tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2020 dan Tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III. 9 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2021, 2022, dan Tahun 2023

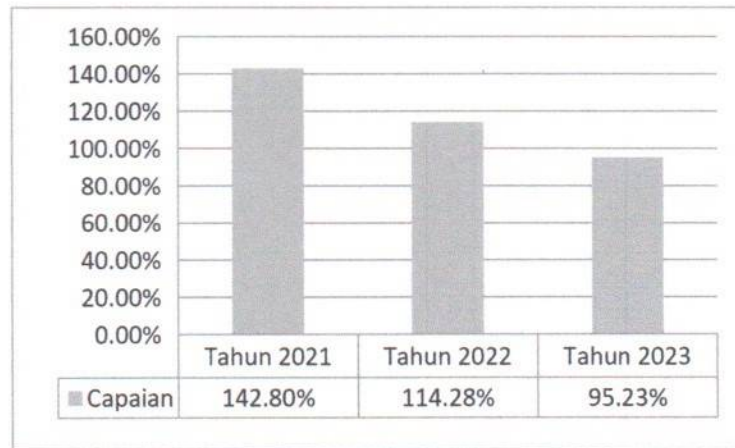
No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat											
1	IKK 2.2 Persentase Penerapan SMART terminal tipe-A	20%	28,56%	142,80%	50%	57,14%	114,28%	60%	57,14%	95,23%	Turun



Gambar III. 37 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023



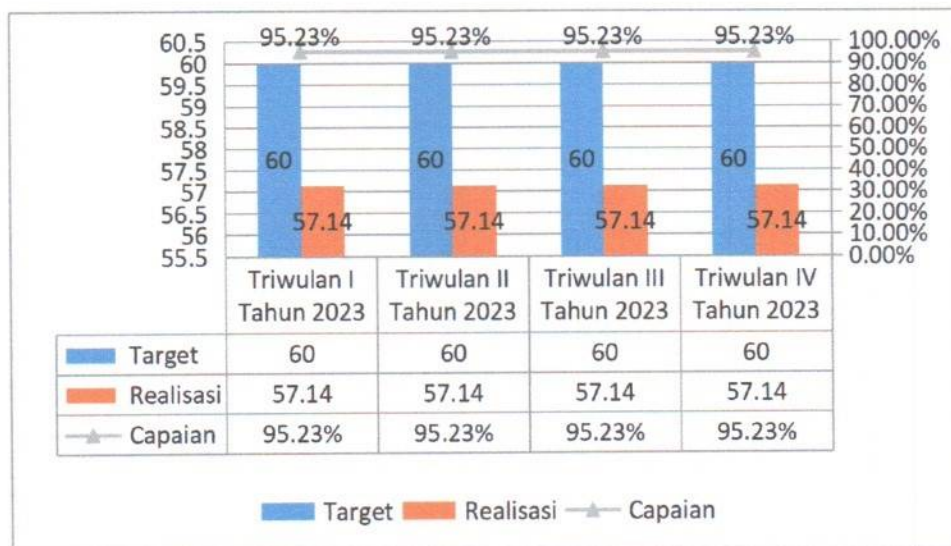
Gambar III. 38 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023



Gambar III. 39 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 Dalam Revisi Renstra BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

Capaian kinerja Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A Tahun 2023 sebesar 95,23% jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2023 dalam Revisi Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 sebesar 60%, maka capaian kinerja mencapai 95,23%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.40.



Gambar III. 40 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Revisi Renstra BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

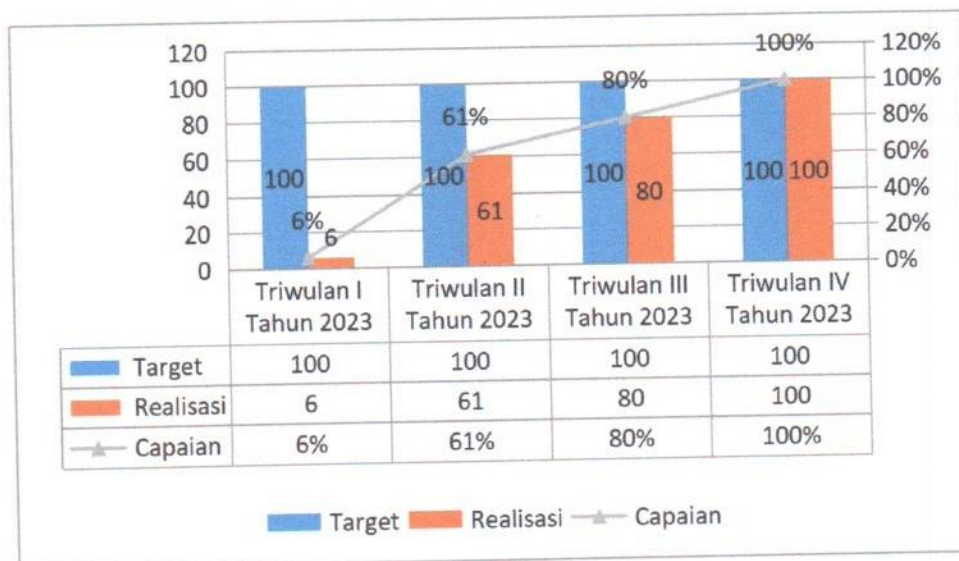
a.1. Definisi Indikator Kinerja

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelabuhan Penyeberangan diatur melalui PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan. Standar Pelayanan Penumpang di Pelabuhan Penyeberangan paling sedikit meliputi (1) keselamatan, (2) keamanan, (3) kehandalan/keteraturan, (4) kenyamanan, (5) kemudahan/keterjangkauan, (6) kesetaraan. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP dihitung berdasarkan pada pemenuhan 6 (enam) aspek pelayanan di salah satu Pelabuhan SDP yang memenuhi SPM di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelabuhan Penyeberangan diatur melalui PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan. Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP dengan satuan ukur persentase digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK\ 2.3 = \frac{\text{jumlah keberadaan pemenuhan aspek pelayanan di pelabuhan SDP yang memenuhi SP}}{\text{jumlah total pemenuhan aspek pelayanan di Pelabuhan SDP sesuai standar pelayanan}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2023

Realisasi capaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP sebesar 100% jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.41.



Gambar III. 41 Grafik Capaian IKK Persentase Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Sesuai PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan, capaian kinerja Persentase Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP sudah terealisasi di Tahun 2023, dimana keberadaan pemenuhan SPM di Pelabuhan SDP di Provinsi Sumatera Selatan telah memenuhi SPM pada aspek pelayanan di Pelabuhan SDP yang memenuhi standar pelayanan yaitu (1) keselamatan, (2) keamanan, (3) kehandalan/keteraturan, (4) kenyamanan, (5) kemudahan/keterjangkauan, (6) kesetaraan. Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP pada Tahun 2023 memiliki capaian kinerja sebesar 100% dikarenakan keenam aspek pelayanan telah terpenuhi di Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api.

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2023 memiliki persentase capaian sebesar 100% yang menunjukkan bahwa realisasi indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP didukung melalui Kegiatan Monitoring SPM Kapal dan SPM Pelabuhan. Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2023 yaitu sebesar 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$IKK\ 2.3 = \frac{6}{6} \times 100\%$$

Keberhasilan dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP ditentukan pada jumlah keberadaan pemenuhan keenam aspek pelayanan di Pelabuhan SDP yang telah memenuhi Standar Pelayanan Minimum, dimana dukungan anggaran kegiatan ini per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp. 15.301.363.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.301.359.664,- atau mencapai 100%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Dari hasil capaian kinerja Persentase Pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP Tahun 2023 menunjukkan realisasi capaian kinerja maupun keuangan yang cukup baik, BPTD Kelas II Sumatera Selatan akan terus meningkatkan kinerja pelaksanaan operasional Pelabuhan SDP secara optimal dan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan baik melalui revitalisasi/rehabilitasi maupun peningkatan sarana prasarana pendukung layanan di Pelabuhan SDP.

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. perencanaan yang komprehensif dalam pelaksanaan monitoring / pengawasan pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP dan perencanaan terhadap alokasi anggaran di Pelabuhan SDP dengan memperhatikan RPJMN dan Renstra.
2. Perbaikan penyelenggaraan operasional Pelabuhan SDP baik berupa dukungan sarana dan prasarananya maupun peningkatan kualitas pelayanannya;
3. Melaksanakan perbaikan sistem informasi Pelabuhan SDP secara digital berupa *ticketing online*;
4. Melaksanakan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat terkait keselamatan pelayaran di Pelabuhan Penyeberangan.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2023 100%, maka capaian kinerja mencapai 100%, sedangkan pada tahun sebelumnya Tahun 2021 dan Tahun 2022 capaian kinerja Persentase Pelaksanaan

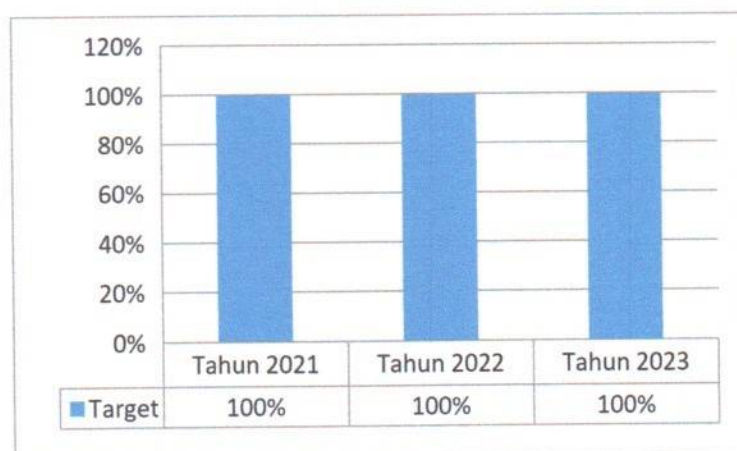


DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP sebesar 100% dengan target 100%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada Tahun 2023 mengalami kondisi tetap dibandingkan pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 yaitu 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III. 10 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023

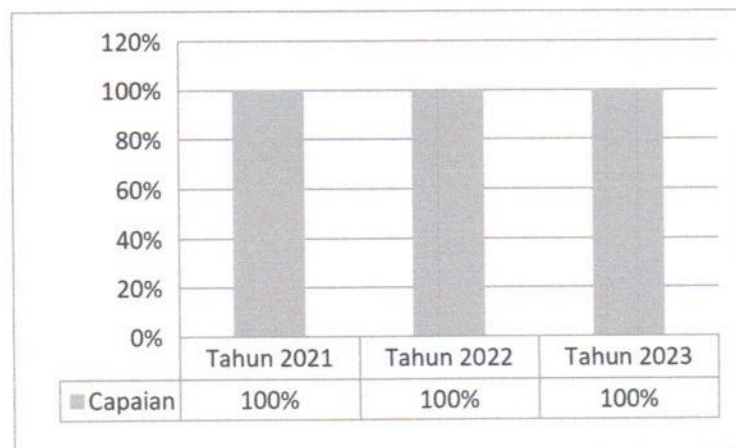
No.	Indikator Kinerja Program	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat											
1	IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tetap



Gambar III. 42 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023



Gambar III. 43 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023



Gambar III. 44 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Revisi Renstra BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2023 dalam Revisi Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 sebesar 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.45.



Gambar III. 45 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Revisi Renstra BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

SK 4 MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 diukur melalui 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

IKK 3.1 : Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal;

IKK 3.2 : Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat;

IKK 3.5 : Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan;

IKK 7a : Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor;

IKK 7b : Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayanan SDP.

IKK 3. 1. Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal dihitung berdasarkan kebutuhan perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 9 (Sembilan) item

Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda. Adapun 9 (Sembilan) item dimaksud meliputi:

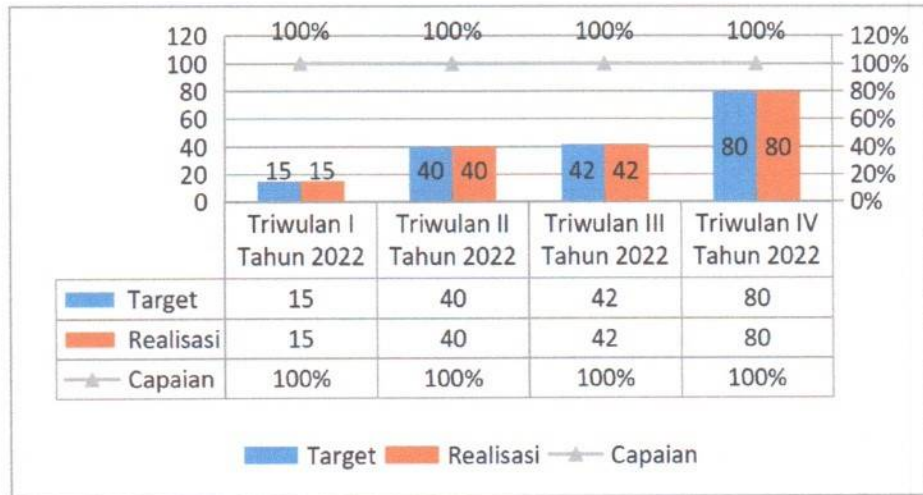
1. Marka Jalan;
2. Rambu Lalu Lintas;
3. Patok Lalu Lintas;
4. Paku Jalan;
5. Pagar Pengaman Jalan;
6. Alat Penerangan Jalan;
7. Lampu Peringatan Pemakai Jalan;
8. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
9. Cermin Tikungan.

Untuk menghitung indikator kinerja kegiatan persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal dengan satuan persentase digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK\ 3.1 = \frac{\text{Jumlah pemenuhan item perlengkapan jalan yang terpasang di Prov. Sumsel (dengan satuan berbeda)}}{\text{Jumlah total item perlengkapan jalan (dengan satuan berbeda)}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2023

Capaian Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Tahun 2023 sebesar 80% jika dibandingkan dengan target PK 2023 sebesar 80%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.46.



Gambar III. 46 Grafik Capaian IKK Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Tahun 2023 memiliki persentase capaian sebesar 80% yang menunjukkan bahwa realisasi indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan. Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Tahun 2023 yaitu sebesar 80% dengan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{80\%}{80\%} \times 100\%$$

Pelaksanaan Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal ditentukan pada jumlah ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang di ruas jalan nasional di Provinsi Sumatera Selatan. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini diukur dari terpenuhinya 8 (delapan) item fasilitas perlengkapan jalan (tanpa cermin tikungan), dimana di wilayah Provinsi Sumatera Selatan belum ditemukan lokasi jalan yang memiliki tikungan tajam.

Adapun dukungan anggaran pada pelaksanaan Pelaksanaan Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal yaitu pada kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, pemeliharaan perlengkapan jalan serta bantuan teknis perlengkapan jalan sebesar Rp. 43.920.391.000,- dengan daya serap anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 43.920.228.237,- atau mencapai 100%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Sesuai amanat Undang-Undang No 22 Tahun 2009 pasal 25 disebutkan bahwa "setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan", dimana perlengkapan jalan untuk:

- a. Jalan Nasional merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat;
- b. Jalan Provinsi merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi;
- c. Jalan Kabupaten / Kota dan jalan desa menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten / Kota;
- d. Jalan Tol menjadi tanggung jawab Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Dari hasil capaian kinerja Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Tahun 2023 menunjukkan realisasi capaian kinerja yang baik meskipun belum seluruh item terpenuhi dari 9 (sembilan) item perlengkapan jalan, namun di Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan sudah sangat baik terpasang fasilitas perlengkapan jalan.

BPTD Kelas II Sumatera Selatan akan terus meningkatkan kinerja pelaksanaan Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Menuju Kondisi Ideal melalui upaya-upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang antara lain:

- e. Melaksanakan percepatan pengadaan bantuan teknis perlengkapan jalan di ruas Jalan Nasional yang belum terpasang fasilitas perlengkapan jalan di Provinsi Sumatera Selatan yang berdampak pada terwujudnya optimalisasi penerapan skema manajemen keselamatan LLAJ berupa pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, pemeliharaan perlengkapan jalan di sejumlah ruas jalan di Provinsi Sumatera Selatan;
- f. Mendukung upaya perbaikan kualitas pengadaan perlengkapan jalan sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Mendorong perbaikan sistem informasi pemasangan perlengkapan jalan guna menunjang pemetaan pemasangan di titik-titik yang merupakan prioritas jalan nasional;
- h. Melaksanakan monitoring / pengawasan kegiatan pemasangan perlengkapan jalan di lokasi-lokasi yang telah ditentukan;

- i. Melakukan perencanaan yang komprehensif terkait waktu pemasangan perlengkapan jalan dan alokasi kebutuhan anggaran agar sesuai dengan target penyelesaian pekerjaan;
- j. Merencanakan optimalisasi waktu dan anggaran agar tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

Realisasi kinerja Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Tahun 2023 sebesar 80% jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2023 sebesar 80% maka capaian kinerja mencapai 100%, sedangkan pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 capaian kinerja Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal sebesar 80% dengan target 80% maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada Tahun 2023 tetap dibandingkan pada Tahun 2021 dan Tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.11 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

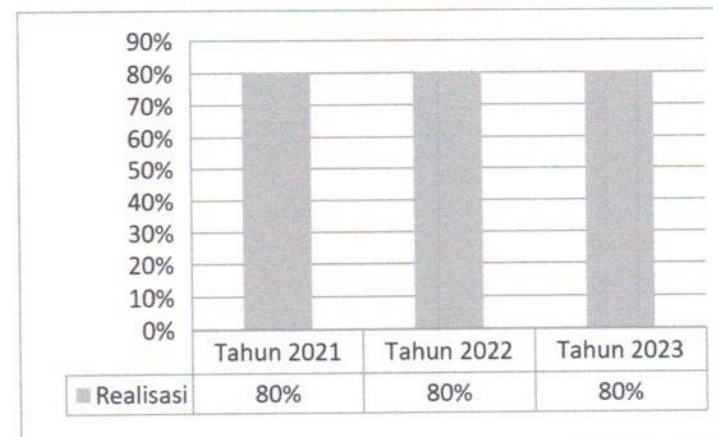
No.	Indikator Kinerja Program	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Naik/ Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat											
1	IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	80%	80%	100%	80%	80%	100%	80%	80%	100%	Tetap



Gambar III. 47 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023



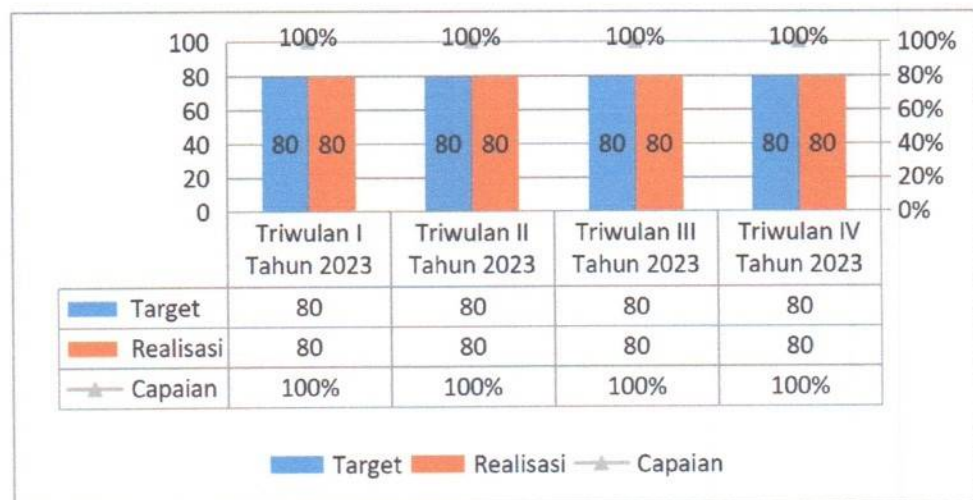
Gambar III. 48 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023



Gambar III. 49 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Revisi Renstra BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

Capaian kinerja Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal sebesar 80% jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2023 dalam Revisi Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 sebesar 80% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.50.



Gambar III. 50 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 Dalam Revisi Renstra BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

IKK 3.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Indikator kinerja Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat dihitung Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat merupakan persentase perbandingan jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran di UPPKB dengan jumlah kendaraan angkutan barang yang masuk UPPKB. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Nomor AJ.007/2/17/DRJD/2020 tanggal 6 April 2020 perihal Toleransi Sanksi Kelebihan Muatan Angkutan Barang Pokok dan Barang Penting, pelanggaran kendaraan angkutan barang adalah pelanggaran terhadap kelebihan muatan yang tercatat di dalam UPPKB.

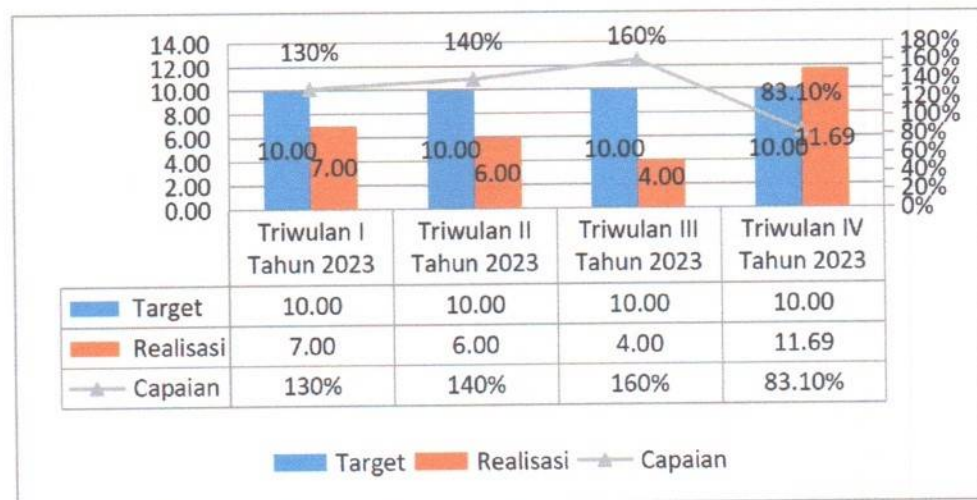
Sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, BPTD Kelas II Sumatera Selatan memiliki tambahan 2 (dua) Satuan Pelayanan UPPKB Baru yang beroperasi yaitu Satpel UPPKB Kertapati dan UPPKB Talang Kelapa dengan waktu operasional selama 24 (dua puluh empat) jam. Pengoperasian kedua UPPKB tersebut ialah melalui skema KPBU-AP, dimana dalam hal pelaksanaan penindakan di UPPKB bekerjasama dengan instansi lain yaitu Polda Sumatera Selatan dan TNI/Polisi Militer.

Pada Bulan November s.d. Desember 2023, kedua UPPKB tersebut telah melakukan pencatatan terhadap pelanggaran kelebihan muatan yang dilakukan oleh kendaraan angkutan barang, sehingga terdapat peningkatan jumlah kendaraan barang yang melanggar dari target sebelumnya 10% berubah menjadi 11,69%.

$$IKK\ 3.2 = \frac{\text{Jumlah kendaraan barang yang melakukan pelanggaran kelebihan muatan di UPPKB}}{\text{Jumlah kendaraan yang masuk di UPPKB}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2023

Capaian Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2023 sebesar 11.69% jika dibandingkan dengan Target PK Tahun 2023 sebesar 10%, maka capaian kinerja mencapai 83,10%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.51.



Gambar III. 51 Grafik Capaian IKK 3.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan yang diperkuat dengan adanya Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan bahwa UPPKB adalah unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan yang melaksanakan tugas pengawasan muatan barang dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada setiap lokasi tertentu. Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2023 memiliki persentase capaian sebesar 11,69% yang menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran kendaraan yang memasuki area UPPKB masih relatif tinggi. Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2023 dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IKK\ 3.2 = \frac{(10\% - (11.69\% - 10\%))}{10\%} \times 100\% = 83,10\%$$

Dukungan anggaran Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat ialah melalui kegiatan Operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), Pelaksanaan dan Pengawasan Bidang Sarana Dan Prasarana Perhubungan Darat, dan Pelaksanaan *Rampcheck* dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.665.438.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.665.421.697,- atau 100%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Dari hasil capaian kinerja Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2023 menunjukan realisasi capaian kinerja yang kurang baik, BPTD Kelas II Sumatera Selatan akan terus meningkatkan kinerja untuk senantiasa bisa menurunkan angka persentase pelanggaran kelebihan muatan di UPPKB melalui upaya:

- a Melaksanakan pengawasan bidang sarana dan prasarana perhubungan darat;
- b Melaksanakan inspeksi keselamatan LLAJ atau *rampcheck* angkutan;
- c Melaksanakan penegakan hukum angkutan barang yang melanggar ketentuan dimensi dan muatan angkutan melalui kerja sama dengan instansi/*stakeholder* lainnya;

- d Melaksanakan sosialisasi ODOL (*over dimension and over loading*) kepada perusahaan dan *driver* angkutan;
- e Mendorong perbaikan sistem informasi yang menunjang kegiatan penindakan pelanggaran di UPPKB melalui sistem digitalisasi.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

Realisasi kinerja Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2023 sebesar 11,69% jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2023 dalam sebesar 10% maka capaian kinerja mencapai 83,10%, sedangkan pada Tahun sebelumnya Tahun 2021 capaian kinerja Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat sebesar 5% dengan target 5%, maka capaian kinerja mencapai 100%, dan pada Tahun 2022 capaian kinerja Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat sebesar 13% dengan target 10%, maka capaian kinerja mencapai 70%. Jadi realisasi pada Tahun 2023 mengalami peningkatan.

Tabel III.12 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022

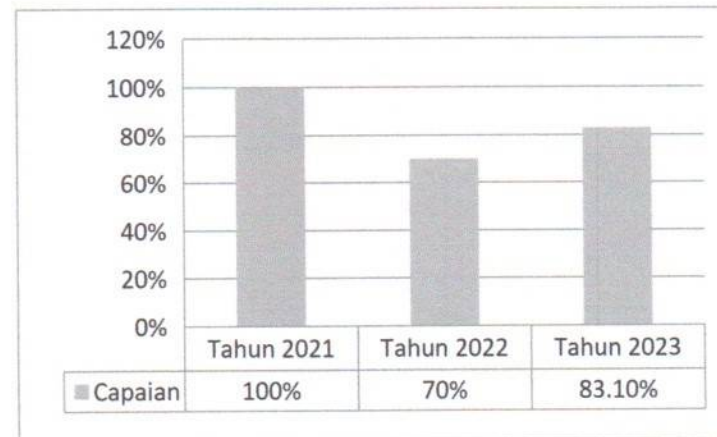
No.	Indikator Kinerja Program	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat											
1	IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	5%	5%	100%	10%	13%	70%	10%	11,69%	83,10%	Naik



Gambar III. 52 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023



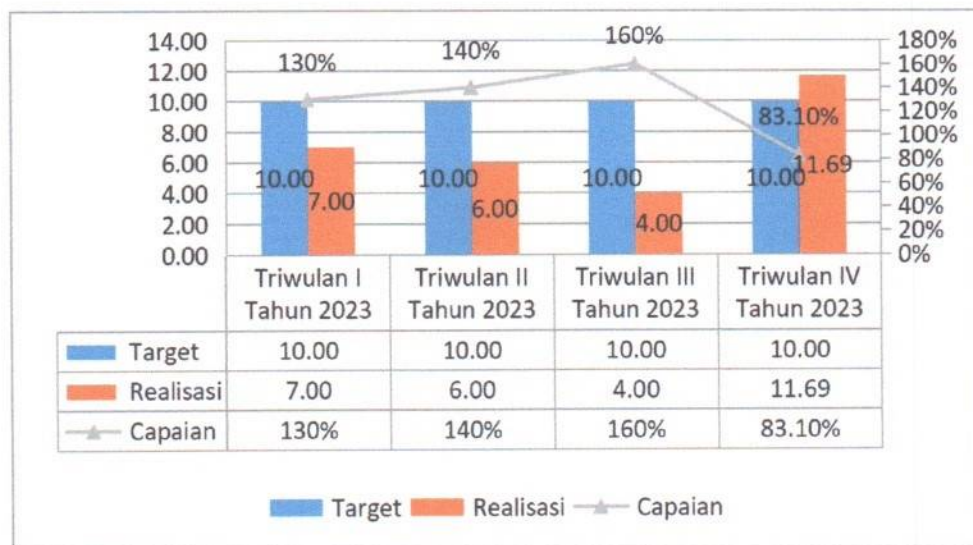
Gambar III. 53 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023



Gambar III. 54 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Revisi Renstra BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

Capaian kinerja Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat sebesar 11,69% jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2023 dalam Revisi Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 sebesar 10% maka capaian kinerja mencapai 83,10%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.55.



Gambar III. 55 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 Dalam Revisi Renstra BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi.

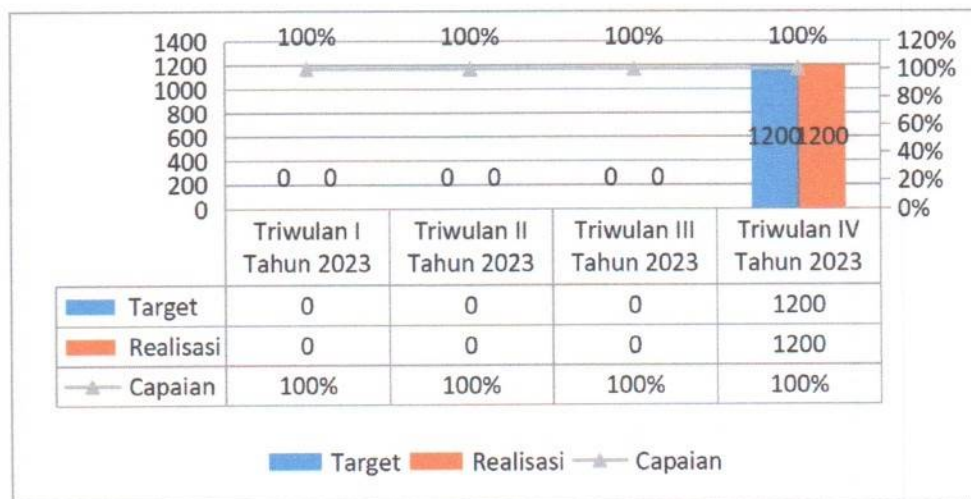
Jumlah masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan. Indikator kinerja Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan

Transportasi Jalan dihitung berdasarkan jumlah orang yang telah tersosialisasi pada pelaksanaan kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan (PNKJ) dengan perhitungan:

$$IKK\ 3.5 = \text{Jumlah kumulatif masyarakat yang mendapat sosialisasi pada PNKJ}$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2023

Capaian Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan sebesar 1200 (seribu dua ratus) orang jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 1200 (seribu dua ratus) orang maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.66.



Gambar III. 66 Grafik Capaian IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan terlaksana melalui Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan yaitu di Kota Palembang dan Kota Pagar Alam. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan dinilai berdasarkan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keselamatan transportasi jalan yang ditentukan dari meningkatnya keselamatan LLAJ bagi para pengguna kendaraan bermotor dan meningkatnya kesadaran berlalu lintas yang selamat bagi masyarakat.

Adapun dukungan anggaran kegiatan ini pada Tahun 2023 sebesar Rp. 500.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 499.882.667,- atau 99,98%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang antara lain yaitu:

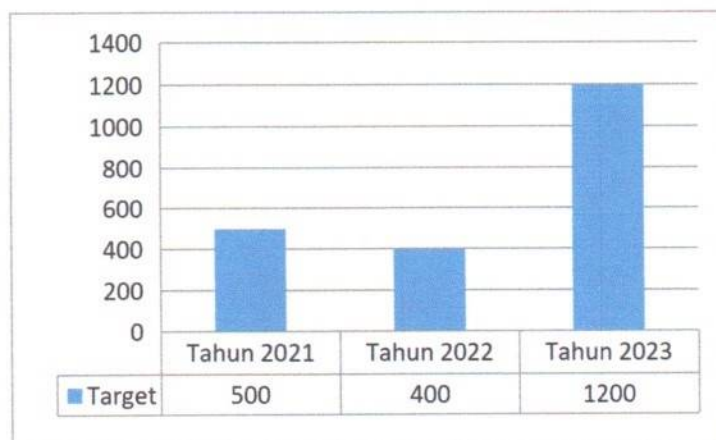
1. Perencanaan yang komprehensif dalam memilih waktu dan lokasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi, target kelompok masyarakat yang akan disosialisasikan, serta alokasi kecukupan anggaran setiap tahunnya dengan memperhatikan RPJMN dan Renstra;
2. Melaksanakan sosialisasi/ memberikan edukasi kepada para *stakeholder* terkait pentingnya keselamatan lalu lintas angkutan jalan;
3. Melaksanakan evaluasi efektifitas penyelenggaraan Pekan Nasional Keselamatan Jalan.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023

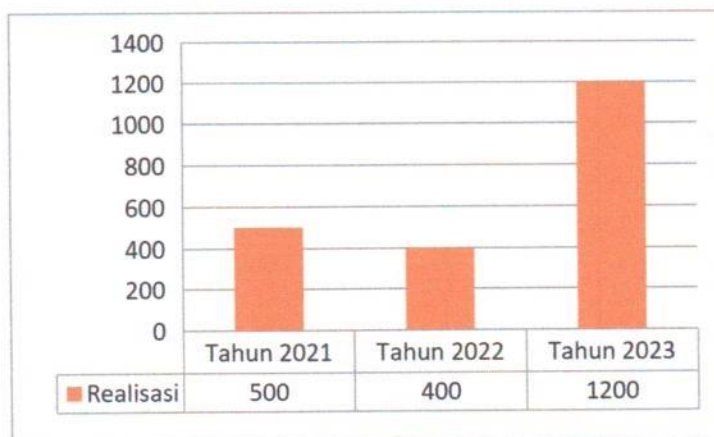
Realisasi kinerja Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan sebesar 1200 (seribu dua ratus) orang jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2023 sebesar 1200 (seribu dua ratus) orang, maka capaian kinerja mencapai 100%, sedangkan pada tahun sebelumnya Tahun 2021 capaian kinerja Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan sebesar 500 (lima ratus) orang dengan target 500 (lima ratus) orang maka capaian kinerja mencapai 100%, serta pada Tahun 2022 capaian kinerja Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan sebesar 400 (empat ratus) orang dengan target 500 (empat ratus) orang maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada Tahun 2022 mengalami kondisi peningkatan dikarenakan kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu berupa Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat di Lokasi Terminal Tipe A Karya Jaya, Terminal Tipe A Alang-alang Lebar dan Kegiatan *Safety Riding* dan Sosialisasi Keselamatan Jalan di Kota Pagar Alam, sehingga target jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan mengalami penambahan dari tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.15 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023

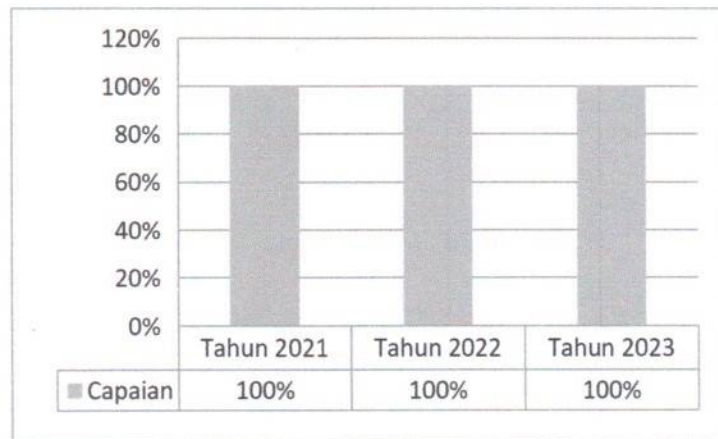
No.	Indikator Kinerja Program	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Naik /Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat											
1	IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	500	500	100%	400	400	100%	1200	1200	100%	Naik



Gambar III. 67 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023



Gambar III. 68 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023



Gambar III. 69 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 Dalam Revisi Renstra BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

Realisasi kinerja Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan sebesar 1200 (seribu dua ratus) orang jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2023 dalam Revisi Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 sebesar 1200 (seribu dua ratus) orang maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.70.



Gambar III. 70 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2023 Dalam Revisi Renstra BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

IKK 7a. Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

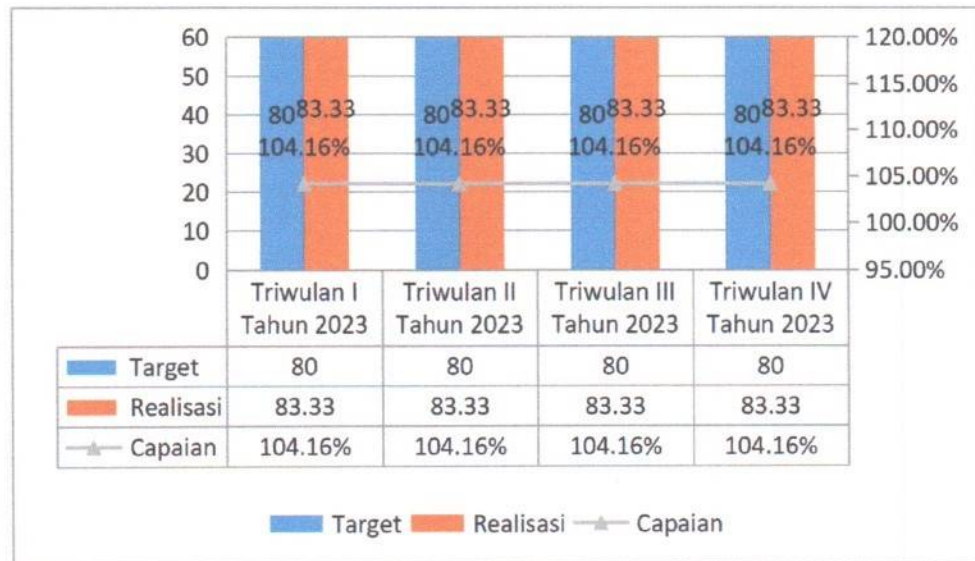
a.1. Definisi Indikator Kinerja

Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dinilai berdasarkan standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor yang merupakan pemberian akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan persentase jumlah kumulatif Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang telah terakreditasi baik milik Pemerintah Daerah maupun swasta sampai dengan tahun ke-n dibandingkan dengan jumlah Pemerintah Daerah di Indonesia ditambah dengan jumlah Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) milik swasta. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah Pemda DKI Jakarta, Seluruh Pemerintah Kota, dan Seluruh Pemerintah Kabupaten di Indonesia. Adapun perhitungan terhadap indikator Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dari:

$$IKK\ 7a = \frac{\text{Jumlah UPUBKB Pemda dan Swasta (APM) yang lulus akreditasi sampai dengan tahun } n}{\text{Jumlah Pemda (DKI Jakarta + Kota + Kab) + Jumlah UPUBKB Swasta (APM)}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2023

Realisasi kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2023 sebesar 83,33% jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 80%, maka capaian kinerja mencapai 104,16%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.76.



Gambar III. 76 Grafik Capaian IKK 7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK. 1471/AJ.402/DRJD/2017 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2023 merupakan kegiatan kalibrasi alat uji pada pengujian kendaraan bermotor di 20 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, dimana pada Tahun 2023 Kab/Kota yang sudah diakreditasi sebanyak 20 Kabupaten/Kota dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung antara lain Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung).

Realisasi Anggaran Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor ditentukan pada terpenuhinya akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB). Adapun dukungan anggaran pelaksanaan kegiatan ini melalui Pengawasan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 254.300.000,- dan realisasi daya serap anggaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 254.292.050,- (100%).

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

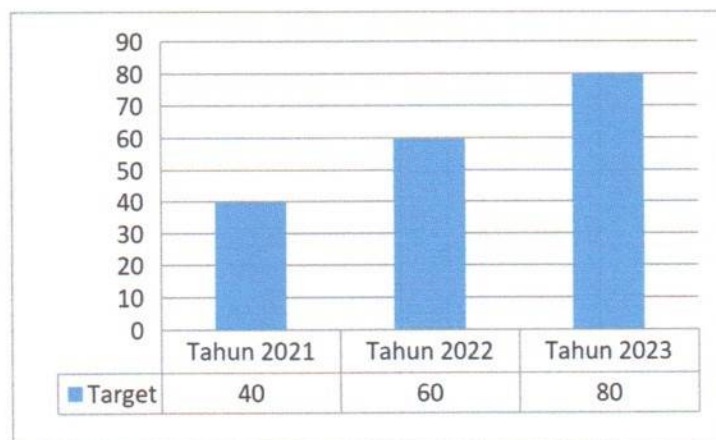
Upaya untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang antara lain yaitu dengan melaksanakan monitoring / pengawasan ke Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan Perdirjen Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022, Tahun 2022 dan Tahun 2023

Realisasi kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar 83,33% jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2023 sebesar 80%, maka capaian kinerja mencapai 104,16%, sedangkan pada tahun sebelumnya Tahun 2021 capaian kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar 40% dengan target 40%, maka capaian kinerja mencapai 100%, serta pada Tahun 2022 capaian kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar 66% dengan target 60%, maka capaian kinerja mencapai 110%. Jadi realisasi pada Tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan pada Tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III. 18 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

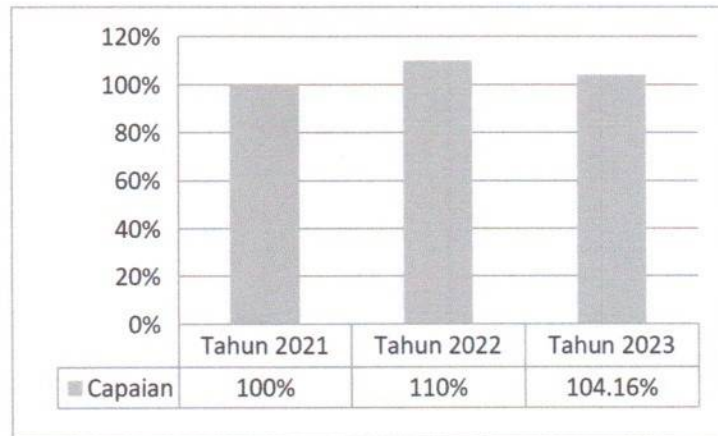
No.	Indikator Kinerja Program	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Naik/ Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat											
1	IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	40,0	40,0	100%	60,0	66,0	110%	80,0	83,33	104,16%	Naik



Gambar III. 77 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023



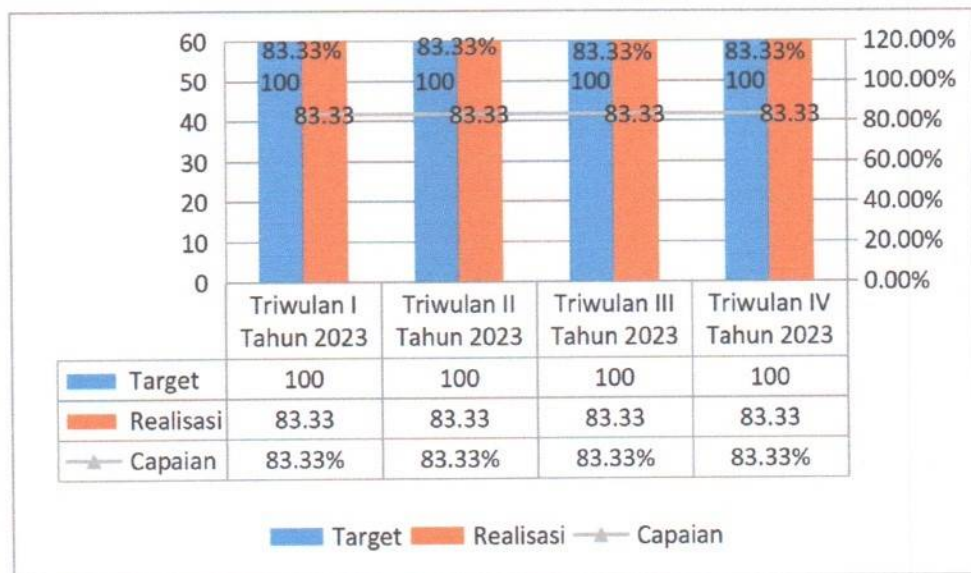
Gambar III. 78 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023



Gambar III. 79 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 Dalam Revisi Renstra BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

Realisasi kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar 83,33% jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2023 dalam Revisi Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 83,33%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.80.



Gambar III. 80 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2023 Dalam Revisi Renstra BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

IKK 7b. Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

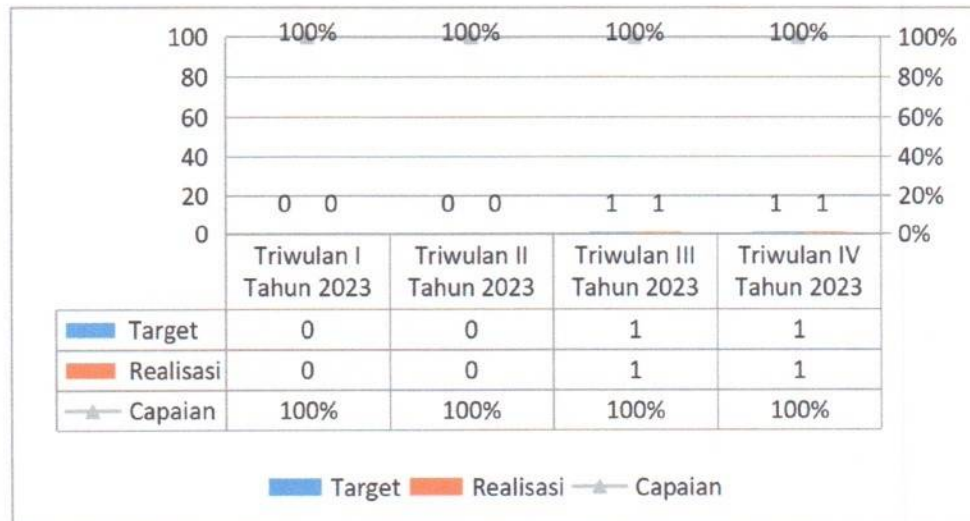
a.1. Definisi Indikator Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2012 tentang Alur Sungai dan Danau, alur pelayaran adalah perairan sungai dan danau. Alur pelayaran adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antara muara sungai yang merupakan satu kesatuan alur-pelayaran sungai dan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayani. Indikator kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP dihitung berdasarkan jumlah kumulatif fasilitas keselamatan yang telah terbangun sampai dengan tahun ke-n dengan rumus sebagai berikut.

$$IKK\ 3.7 = \text{Jumlah fasilitas keselamatan yang terbangun s.d tahun } (n)$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2023

Capaian Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP sampai dengan Tahun 2023 sebesar 1 (satu) Lokasi jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 1 (satu) Lokasi maka capaian kinerja sebesar 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.81.



Gambar III. 81 Grafik Capaian IKK Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Tahun 2023 ditentukan pada terpenuhinya fasilitas alur keselamatan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, dimana pada Tahun 2023 dilaksanakan Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai dan Danau di Provinsi Sumatera Selatan yaitu di Kabupaten Banyuasin. Adapun dukungan alokasi pagu anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan realisasi daya serap anggaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 999.999.786,- (100%).

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu dengan melakukan kegiatan Pengukuran Kapal Sungai, Danau dan Penyeberangan, Inventarisasi Fasilitas Keselamatan Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Inspeksi Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gakum SDP) secara rutin/berkala untuk mengakomodir alokasi kebutuhan fasilitas keselamatan alur pelayaran di Provinsi Sumatera Selatan, antara lain:

1. Melakukan pengecekan administrasi secara berkala terkait dokumen kapal yang bersangkutan, bukti pembayaran PNBP sampai manifest keberangkatan kapal;

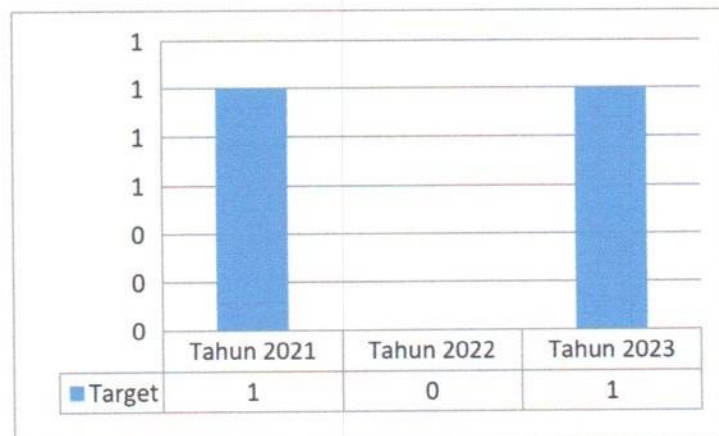
2. Melaksanakan edukasi tentang pentingnya mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan kapal bagi setiap kapal yang akan berlayar;
3. Sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya fasilitas keselamatan di kapal.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

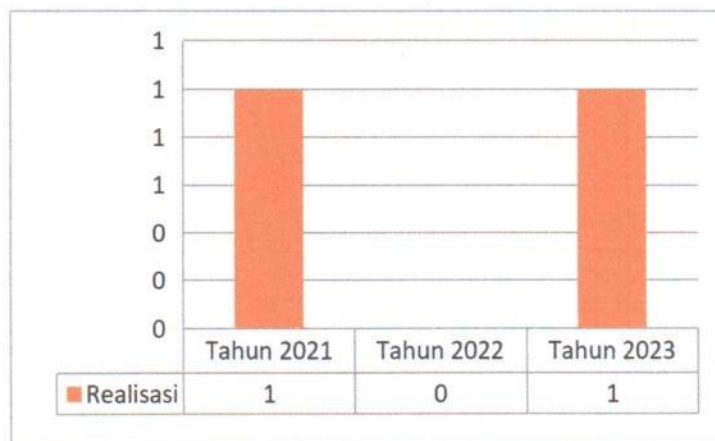
Realisasi kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP sebesar 1 (satu) Lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2023 sebesar 1 (satu) Lokasi, maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan pada Tahun 2022 capaian kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP sebesar 8 (delapan) Lokasi dengan target 8 (delapan) Lokasi, maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada tahun 2022 mengalami kondisi turun dibandingkan pada tahun 2020 dan Tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 19. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2021, 2020 dan Tahun 2022

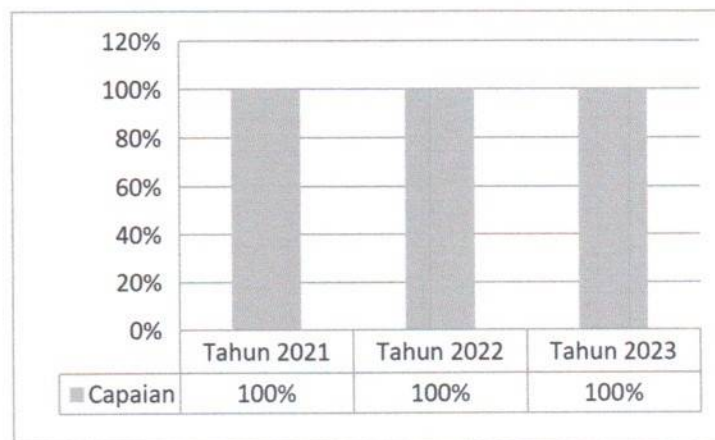
No.	Indikator Kinerja Program	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Naik/ Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat											
1	IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran SDP	1	1	100%	0	0	100%	1	1	100%	Naik



Gambar III. 82 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023



Gambar III. 83 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023



Gambar III. 84 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 Dalam Revisi Renstra BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

Realisasi kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP sebesar 1 (satu) Lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2023 dalam Revisi Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 sebesar 1 (satu) Lokasi, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 85.



Gambar III. 85 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Tahun 2023 Dalam Revisi Renstra BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

SK 5 MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN DUKUNGAN TEKNIS TRANSPORTASI DARAT

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

IKK 5.1 : Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat yaitu:

- Aspek Perencanaan;
- Aspek Kepegawaian (SDM);
- Aspek Keuangan; dan
- Aspek Penyelenggaraan Perkantoran (umum).

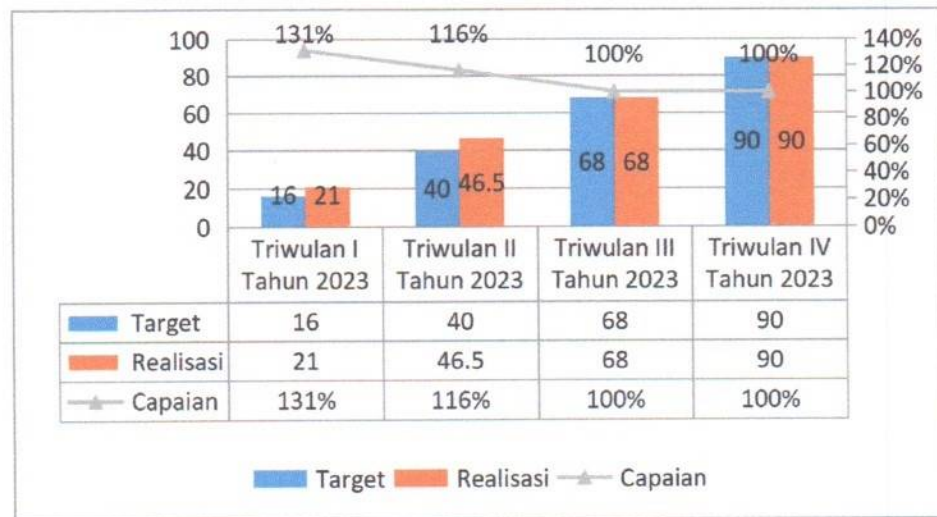
Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi *e-performance*.

Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin. Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Sedangkan, aspek penyelenggaraan perkantoran dinilai berdasarkan

hasil survei indeks kepuasan pegawai satuan kerja terhadap penyelenggaraan perkantoran.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2023

Realisasi Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2023 sebesar 90 jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 90, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.86.



Gambar III. 86 Grafik Capaian IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi. Adapun pelaksanaan tupoksi ini meliputi beberapa aspek penunjang penyelenggaraan dukungan teknis. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2023 mempunyai nilai 90. Dengan demikian, keberhasilan capaian indikator kinerja kegiatan kualitas

penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat telah memenuhi target yang ditetapkan.

Keberhasilan penilaian Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat ditentukan pada tersedianya bahan, rencana kerja dan anggaran, dokumen perencanaan (LAKIP, LAPTAH, PK dll) dan jumlah dikeluarkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap pelaksanaan teknis kegiatan pada BPTD Kelas II Sumatera Selatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun dukungan anggaran pada pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 6.435.945.000,- dengan realisasi daya serap anggaran kegiatan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 6.435.752.592,- (100%).

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Pada Tahun 2023 ini Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat telah memenuhi target yang ditetapkan, namun BPTD Kelas II Sumatera Selatan akan selalu terus berupaya meningkatkan aspek-aspek yang menjadi dasar penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat melalui:

1. Melaksanakan sosialisasi/memberikan edukasi kepada para pegawai tentang pentingnya menjaga kualitas penyelenggaraan dukungan teknis;
2. Melaksanakan evaluasi efektifitas penyelenggaraan dukungan teknis; dan
3. Mendorong perbaikan sistem informasi yang menunjang kegiatan.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

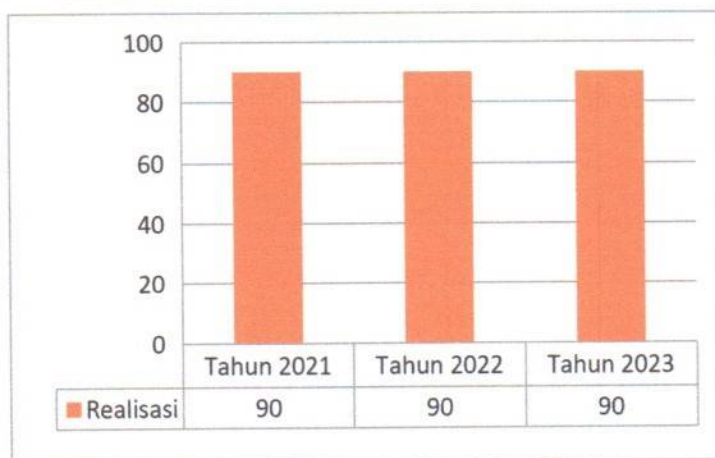
Realisasi kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebesar 90 jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2023 dalam Revisi Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 sebesar 90, maka capaian kinerja mencapai 100%, sedangkan pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 capaian kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebesar 90 dengan target 90, maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada Tahun 2023 mengalami kondisi tetap dibandingkan pada Tahun 2021 dan Tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III. 20 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

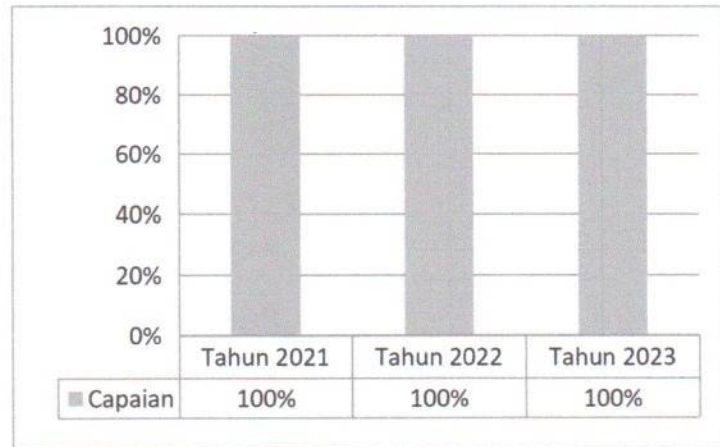
No.	Indikator Kinerja Program	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Naik/ Turun
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat											
1	IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	90	90	100%	90	90	100%	90	90	100%	Tetap



Gambar III. 87 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023



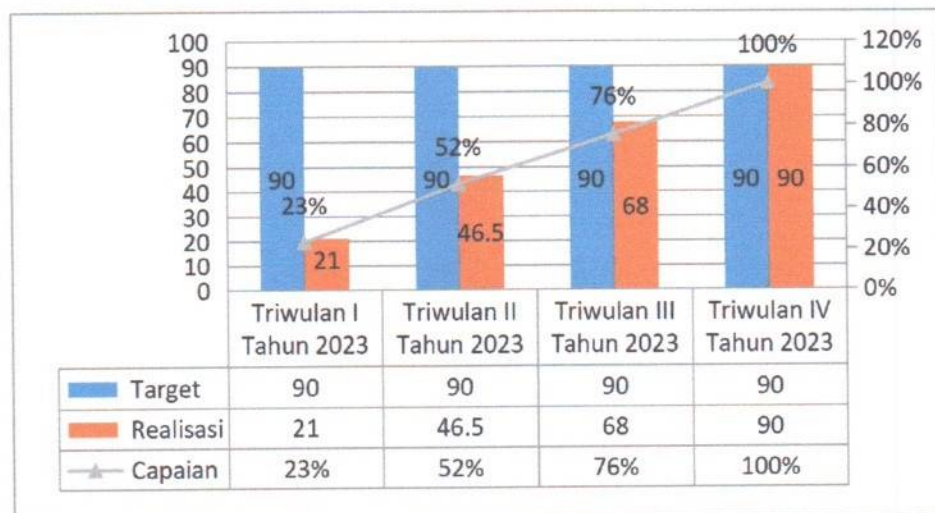
Gambar III. 88 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023



Gambar III. 89 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 Dalam Revisi Renstra BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

Realiasi kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebesar 90 jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2023 dalam Revisi Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 sebesar 90, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.90.



Gambar III. 90 Perbandingan Realisasi Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2023 Dalam Revisi Renstra BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

SK 1 MENINGKATNYA BIROKRASI DITJEN PERHUBUNGAN DARAT AKUNTABEL

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

IKK1: Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat.

IKK1. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

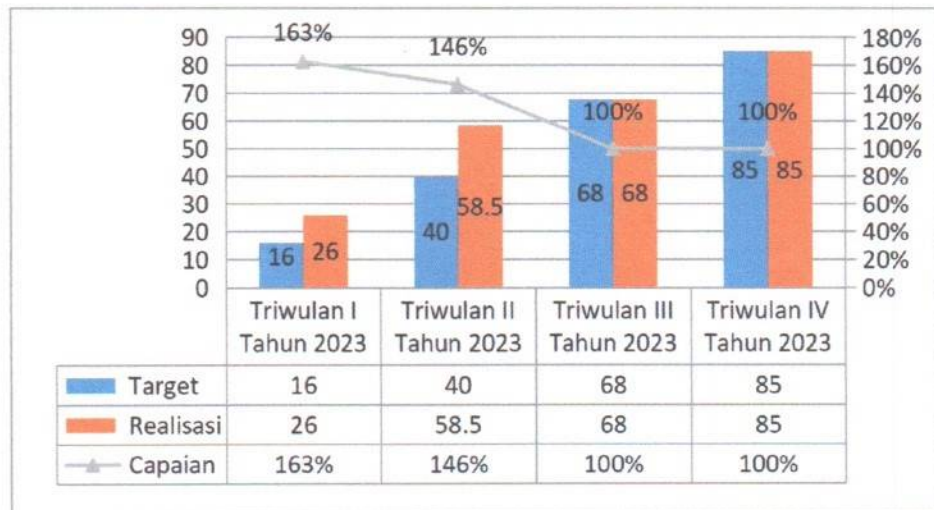
a.1. Definisi Indikator Kinerja

Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara perkantoran dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai pada unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk mendukung kinerja sebagai bentuk pelayanan prima.

Indikator kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat dihitung berdasarkan pada terselenggaranya pelaksanaan kegiatan perkantoran pada BPTD Kelas II Sumatera Selatan.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2023

Realisasi Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2023 sebesar 85 jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 85, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.91.



Gambar III. 91 Grafik Capaian IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi. Adapun pelaksanaan tupoksi ini meliputi beberapa aspek penunjang penyelenggaraan perkantoran. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sampai dengan 31 Desember 2023 mempunyai nilai 85. Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat telah memenuhi target yang ditetapkan.

Adapun dukungan anggaran pada pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 31.219.303.000,- dengan realisasi daya serap anggaran kegiatan sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 31.204.833.507,- (100%).

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Pada Tahun 2023 ini Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat telah memenuhi target yang ditetapkan, namun BPTD Kelas II Sumatera Selatan akan selalu terus berupaya meningkatkan aspek-aspek yang menjadi

dasar penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat melalui upaya:

1. Melaksanakan internalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh kepada seluruh pegawai di lingkungan BPTD Kelas II Sumatera Selatan;
2. Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan BPTD Kelas II Sumatera Selatan;
3. Melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas hasil Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan BPTD Kelas II Sumatera Selatan.

Pada Tahun 2023 ini Tingkat penyelenggaraan perkantoran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah memenuhi target yang ditetapkan, namun BPTD Kelas II Sumatera Selatan akan selalu terus berupaya meningkatkan kemampuan penyelenggara perkantoran dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai pada unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk mendukung kinerja sebagai bentuk pelayanan prima.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

Realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat sebesar 85 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 sebesar 85 maka capaian kinerja mencapai 100%, sedangkan pada tahun sebelumnya Tahun 2021 dan Tahun 2022 capaian kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat sebesar 85 dengan target 85, maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada Tahun 2023 mengalami kondisi tetap dibandingkan pada Tahun 2021 dan Tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.21 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

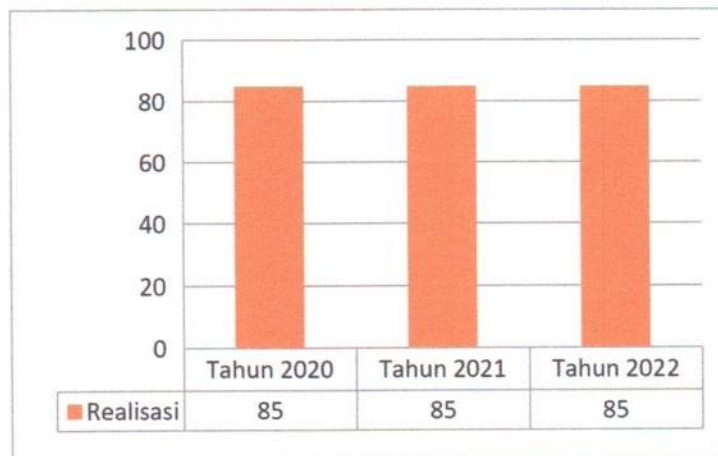
No.	Indikator Kinerja Program	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Naik/ Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 5 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel											
1	IKK1 Tingkat	85	85	100%	85	85	100%	85	85	100%	Tetap



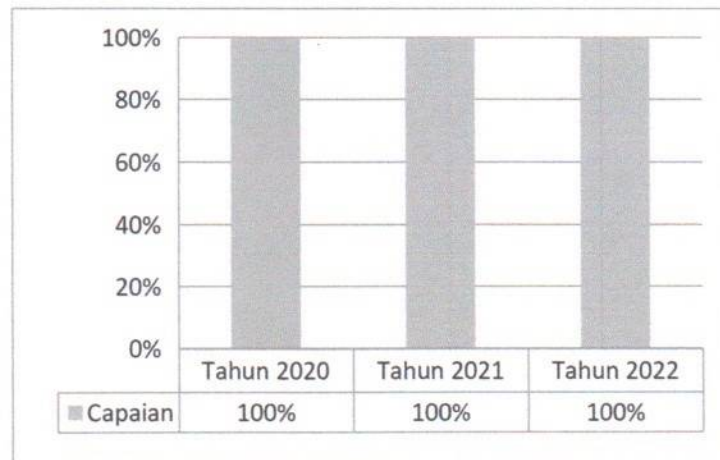
Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Gambar III. 92 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023



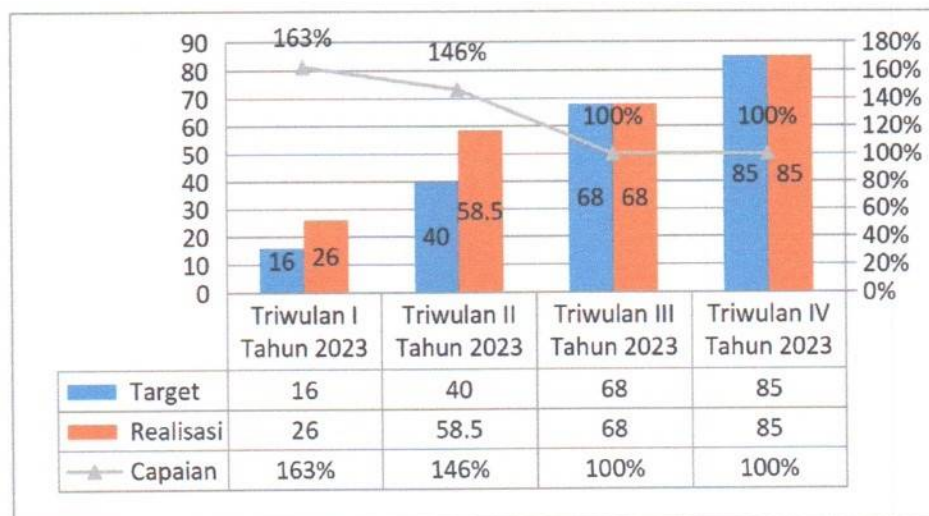
Gambar III. 93 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023



Gambar III. 94 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 Dalam Revisi Renstra BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

Realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat sebesar 85 jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2023 dalam Revisi Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 sebesar 85, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.95.



Gambar III. 95 Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2023 Dalam Revisi Renstra BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

III.3 Realisasi Anggaran

III.3.I Alokasi Anggaran Tahun 2023

III.3.1.1. Pagu Anggaran

- 1) Pagu Awal DIPA TA. 2022 sebesar **Rp 169.999.333.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.22 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2023

RM	Rp.	150.943.670.000	88,79%
PNBP	Rp.	19.055.663.000	11,21%
SBSN	Rp.	-	-
Total	Rp.	169.999.333.000	100%

Tabel III.23 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2023

Belanja Pegawai	Rp.	22.104.607.000	13,00%
Belanja Barang	Rp.	94.205.272.000	55,42%
Belanja Modal	Rp.	53.689.454.000	31,58%
Total	Rp.	169.999.333.000	100%

Terdapat perubahan dan pergeseran pagu pada DIPA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan TA. 2023 akibat adanya Revisi DIPA di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp7.723.389.000,-, sehingga Total Pagu akhir DIPA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp177.722.722.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.24 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu Tahun Anggaran 2023

RM	Rp.	158.667.059.000	89,28%
PNBP	Rp.	19.055.663.000	10,72%
SBSN	Rp.	-	-
Total	Rp.	177.722.722.000	100,00%

Sumber: Data Diolah BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2024)

Tabel III.25 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu Tahun Anggaran 2023

Belanja Pegawai	Rp.	24.311.270.000	13,68%
Belanja Barang	Rp.	98.692.708.000	55,53%
Belanja Modal	Rp.	54.718.744.000	30,79%
Total	Rp.	177.722.722.000	100,00%

Sumber: Data Diolah BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2024)

Penambahan dan pergeseran anggaran tersebut sesuai surat pengesahan revisi anggaran sebagai berikut:

- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2022
 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403847/2022 *kode digital stamp* : DS:0951-5226-0043-1307 Tanggal 14 Desember 2021 (Revisi ke-I)
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2022
 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403847/2022 *kode digital stamp* : DS:6711-0080-0412-8080 Tanggal 16 Maret 2022 (Revisi ke-II)
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2022
 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403847/2022 *kode digital stamp* : DS:7691-2100-5429-78901307 Tanggal 12 April 2022 (Revisi ke-III)
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2022
 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403847/2022 *kode digital stamp* : DS:5098-4329-0900-6379Tanggal 14 Juni 2022 (Revisi ke-IV)
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2022
 Nomor: SP DIPA- 022.03.2.403847/2022 *kode digital stamp* : DS:0463-4939-0050-35741307 Tanggal 21 Agustus 2022 (Revisi ke-V)
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2022
 Nomor: SP DIPA- 022.03.2.403847/2022 *kode digital stamp* : DS:3226-1794-8839-6395Tanggal 31 Agustus 2022 (Revisi ke-VI)
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2022
 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403847/2022 *kode digital stamp* : DS:0340-2032-5161-3435 Tanggal 05 Oktober 2022 (Revisi ke-VII)



- h. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2022
Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403847/2022 *kode digital stamp* : DS:4101-5224-9257-9271 Tanggal 25 Oktober 2022 (Revisi ke-VIII)
- i. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2022
Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403847/2022 *kode digital stamp* : DS:7079-8081-0398-0954 Tanggal 08 November 2022 (Revisi ke-IX)
- j. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2022
Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403847/2022 *kode digital stamp* : DS:7079-8081-0398-0954 Tanggal 25 November 2022 (Revisi ke-X)
- k. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2022
Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403847/2022 *kode digital stamp* : DS:8269-9517-1709-3735 Tanggal 05 Desember 2022 (Revisi ke-XI)
- l. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2022
Nomor : SP DIPA- 022.03.2.403847/2022 *kode digital stamp* : DS:8269-9517-1709-3735 Tanggal 08 Desember 2022 (Revisi ke-XII)

Tabel III.26 Rincian Revisi Per Sumber Dana T.A. 2023

	SUMBER DANA			JUMLAH
	RM	PNBP	SBSN	
PAGU AWAL	150.943.670.000	19.055.663.000	-	169.999.333.000
REVISI KE-1	150.943.670.000	19.055.663.000	-	169.999.333.000
REVISI KE-2	150.943.670.000	19.055.663.000	-	169.999.333.000
REVISI KE-3	150.943.670.000	19.055.663.000	-	169.999.333.000
REVISI KE-4	151.885.658.000	19.055.663.000	-	170.941.321.000
REVISI KE-5	151.885.658.000	19.055.663.000	-	170.941.321.000
REVISI KE-6	147.529.439.000	19.055.663.000	-	166.585.102.000
REVISI KE-7	157.671.370.000	19.055.663.000	-	176.727.033.000
REVISI KE-8	157.402.384.000	19.055.663.000	-	176.458.047.000
REVISI KE-9	158.667.059.000	19.055.663.000	-	177.722.722.000
REVISI KE-10	158.667.059.000	19.055.663.000	-	177.722.722.000
REVISI KE-11	158.667.059.000	19.055.663.000	-	177.722.722.000
REVISI KE-12	158.667.059.000	19.055.663.000	-	177.722.722.000

Sumber: Data Diolah BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2024)

Tabel III. 27 Rincian Revisi per Jenis Belanja T.A. 2023

	SUMBER DANA			JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
PAGU AWAL	22.104.607.000	94.205.272.000	53.689.454.000	169.999.333.000
REVISI KE-1	22.104.607.000	94.205.272.000	53.689.454.000	169.999.333.000
REVISI KE-2	22.104.607.000	94.205.272.000	53.689.454.000	169.999.333.000
REVISI KE-3	22.104.607.000	94.087.272.000	53.807.454.000	169.999.333.000
REVISI KE-4	23.046.595.000	94.087.272.000	53.807.454.000	170.941.321.000
REVISI KE-5	23.046.595.000	94.087.272.000	53.807.454.000	170.941.321.000
REVISI KE-6	23.046.595.000	90.074.763.000	53.463.744.000	166.585.102.000
REVISI KE-7	23.046.595.000	98.961.694.000	54.718.744.000	176.727.033.000
REVISI KE-8	23.046.595.000	98.692.708.000	54.718.744.000	176.458.047.000
REVISI KE-9	24.311.270.000	98.692.708.000	54.718.744.000	177.722.722.000
REVISI KE-10	24.311.270.000	98.692.708.000	54.718.744.000	177.722.722.000
REVISI KE-11	24.311.270.000	98.692.708.000	54.718.744.000	177.722.722.000
REVISI KE-12	24.311.270.000	98.692.708.000	54.718.744.000	177.722.722.000

Sumber: Data Diolah BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2024)

Tabel III.28 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja T.A. 2023

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR TRIWULAN I	PERUBAHAN	PAGU AKHIR TRIWULAN II	PERUBAHAN	PAGU AKHIR TRIWULAN III	PERUBAHAN	PAGU AKHIR TRIWULAN IV
Belanja Pegawai	22.104.607.000	-	22.104.607.000	-	22.104.607.000	(941.988.000)	23.046.595.000	1.264.675.000	24.311.270.000
Belanja Barang	94.205.272.000	-	94.205.272.000	(118.000.000)	94.087.272.000	(4.012.509.000)	90.074.763.000	8.617.945.000	98.692.708.000
• RM	91.450.972.000	-	91.450.972.000	(118.000.000)	91.332.972.000	(4.012.509.000)	87.320.463.000	8.617.945.000	95.938.408.000
• PNPB	2.754.300.000	-	2.754.300.000	-	2.754.300.000	-	2.754.300.000	-	2.754.300.000
Belanja Modal	53.689.454.000	-	53.689.454.000	118.000.000	53.807.454.000	(343.710.000)	53.463.744.000	1.255.000.000	54.718.744.000
• RM	37.388.091.000	-	37.388.091.000	118.000.000	37.506.091.000	(343.710.000)	37.162.381.000	1.255.000.000	38.417.381.000
• PNPB	16.301.363.000	-	16.301.363.000	-	16.301.363.000	-	16.301.363.000	0	16.301.363.000
• SBSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	169.999.333.000	-	169.999.333.000	-	169.999.333.000	(5.298.207.000)	166.585.102.000	11.137.620.000	177.722.722.000

Sumber: Data Diolah BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2024)



Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

Tabel III.29 Rincian Program – Program Kegiatan DIPA T.A. 2023

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	TRIWULAN I		PAGU PER TRIWULAN II	TRIWULAN II		PAGU PER TRIWULAN III	TRIWULAN III		PAGU PER TRIWULAN IV	TRIWULAN IV	
				REALISASI	%		REALISASI	%		REALISASI	%		REALISASI	%
022.03	Ditjen Perhubungan Darat	169.999.333.000	169.999.333.000	20.968.178.421	12,33	169.999.333.000	79.101.141.075	46,53	177.722.722.000	128.837.118.624	72,49	177.722.722.000	177.707.307.773	99,99
022.03.64	Program Infrastruktur Konektivitas	140.439.533.000	140.439.533.000	13.136.105.934	9,35	140.439.533.000	62.275.912.341	44,34	146.385.419.000	106.467.587.223	72,73	146.385.419.000	146.384.523.266	100,00
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	12.338.710.000	12.338.710.000	1.506.607.505	12,21	12.338.710.000	3.826.448.685	31,01	12.069.724.000	6.759.462.437	56,00	12.069.724.000	12.069.719.108	100,00
4638	Pelayanan Transportasi Darat	76.402.770.000	76.402.770.000	3.025.196.869	3,96	76.402.770.000	31.377.558.966	41,07	76.440.478.000	57.448.900.926	75,16	76.440.478.000	76.440.049.950	100,00
4639	Kesejahteraan dan Keamanan Transportasi Darat	42.670.341.000	42.670.341.000	7.823.398.466	18,33	42.670.341.000	24.475.404.754	57,36	51.557.272.000	38.625.776.742	74,92	51.557.272.000	51.556.952.616	100,00
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	9.027.712.000	9.027.712.000	780.903.094	8,65	9.027.712.000	2.596.499.936	28,76	6.317.945.000	3.633.447.118	57,51	6.317.945.000	6.317.801.592	100,00
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	29.559.800.000	29.559.800.000	7.832.072.487	26,50	29.559.800.000	16.825.228.734	56,92	31.337.303.000	22.369.531.401	71,38	31.337.303.000	31.322.784.507	99,95
4596	Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	118.000.000	118.000.000	-	-	118.000.000	81.872.000	69,38	118.000.000	107.552.000	91,15	118.000.000	117.951.000	99,96
4670	Pengembangan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	7.337.193.000	7.337.193.000	2.012.020.200	27,42	7.337.193.000	3.441.177.275	46,90	6.908.033.000	4.407.167.422	63,80	6.908.033.000	6.907.990.483	100,00
4671	Pengembangan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	22.104.607.000	22.104.607.000	5.820.052.287	26,33	22.104.607.000	13.384.051.459	60,55	24.311.270.000	17.854.811.979	73,44	24.311.270.000	24.296.843.024	99,94

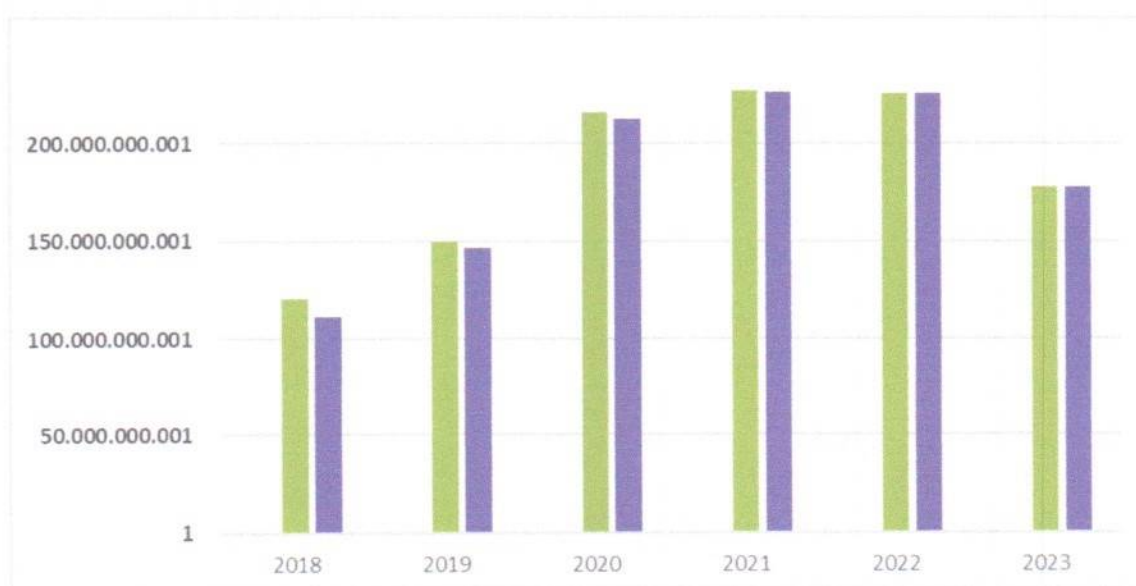
Sumber: Data Diolah BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2024)

III.3.1.3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2023

Adapun data perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2018 – 2023, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.30 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2018 – Tahun 2023

No	Tahun	Pagu Akhir	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
1	2018	120.528.305.000	110.980.027.623	92,08
2	2019	150.004.623.000	146.272.982.897	97,51
3	2020	216.371.699.000	212.845.633.145	98,37
4	2021	227.713.955.000	226.635.445.550	99,53
5	2022	225.939.345.000	225.770.641.103	99,93
6	2023	177.722.722.000	177.707.307.773	99,99



Gambar III. 96 Grafik Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran Tahun 2018 – Tahun 2023

Berdasarkan data di atas dapat diketahui nilai pagu awal, pagu akhir, dan realisasi setiap tahunnya, sehingga diketahui masing – masing dana yang terserap setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2020 anggaran yang terserap sebesar Rp212.845.633.145,- atau mencapai 98,37% dari pagu akhir Rp216.371.699.000,- Namun pada tahun 2021 terjadi kenaikan serapan anggaran yaitu sebesar Rp226.635.445.550,- atau mencapai 99,53% dari pagu akhir Rp227.713.955.000,-Lalu, pada Tahun 2022 periode Triwulan IV penyerapan anggaran yaitu sebesar Rp225.770.641.103,- atau mencapai 99,93% dari pagu akhir Tahun 2022 sebesar Rp225.939.345.000,- dan pada Tahun Anggaran 2023 Pagu sebesar Rp177.722.722.000 terealisasi mencapai 99,99% yaitu sebesar Rp177.707.307.773.

1) Realisasi Anggaran

III.3.2.1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2023

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

Tabel III. 31 Kegiatan Program yang ada dalam DIPA

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	TRIWULAN I		PAGU PER TRIWULAN II		TRIWULAN II		PAGU PER TRIWULAN III		TRIWULAN III		PAGU PER TRIWULAN IV		TRIWULAN IV	
				REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%
022.03	Djten Perhubungan Darat	169.999.333.000	169.999.333.000	20.968.178.421	12,33	169.999.333.000	100,00	79.101.141.075	46,53	177.722.722.000	100,00	128.837.118.624	72,49	177.722.722.000	100,00	177.707.307.773	99,99
022.03.6A	Program Infrastruktur Konektivitas	140.439.533.000	140.439.533.000	13.136.105.934	9,35	140.439.533.000	100,00	62.275.912.341	44,34	146.385.419.000	100,00	106.467.587.223	72,73	146.385.419.000	100,00	146.384.523.266	100,00
4637	Infrastruktur Konektivitas	12.338.710.000	12.338.710.000	1.506.607.505	12,21	12.338.710.000	100,00	3.826.448.685	31,01	12.069.724.000	100,00	6.759.462.437	56,00	12.069.724.000	100,00	12.069.719.108	100,00
4638	Pelayanan Transportasi Darat	76.402.770.000	76.402.770.000	3.025.196.869	3,96	76.402.770.000	100,00	31.377.558.966	41,07	76.440.478.000	100,00	57.448.900.926	75,16	76.440.478.000	100,00	76.440.049.950	100,00
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	42.670.341.000	42.670.341.000	7.823.398.466	18,33	42.670.341.000	100,00	24.475.404.754	57,36	51.557.272.000	100,00	38.625.776.742	74,92	51.557.272.000	100,00	51.556.952.616	100,00
4640	Perunjangan Teknis Transportasi Darat	9.027.712.000	9.027.712.000	780.903.094	8,65	9.027.712.000	100,00	2.596.499.936	28,76	6.317.945.000	100,00	3.633.447.118	57,51	6.317.945.000	100,00	6.317.801.592	100,00
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	29.559.800.000	29.559.800.000	7.832.072.487	26,50	29.559.800.000	100,00	16.825.228.734	56,92	31.337.303.000	100,00	22.369.531.401	71,38	31.337.303.000	100,00	31.322.784.507	99,95
4596	Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	118.000.000	118.000.000	-	-	118.000.000	100,00	81.872.000	69,38	118.000.000	100,00	107.552.000	91,15	118.000.000	100,00	117.951.000	99,96
4670	Pengembangan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	7.337.193.000	7.337.193.000	2.012.020.200	27,42	7.337.193.000	100,00	3.441.177.275	46,90	6.908.033.000	100,00	4.407.167.422	63,80	6.908.033.000	100,00	6.907.990.483	100,00
4671	Pengembangan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	22.104.607.000	22.104.607.000	5.820.052.287	26,33	22.104.607.000	100,00	13.394.051.459	60,55	24.311.270.000	100,00	17.854.811.979	73,44	24.311.270.000	100,00	24.296.843.024	99,94

Realisasi penyerapan anggaran Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebesar **Rp177.707.307.773,-** atau mencapai **99,99%** dari total pagu sebesar **Rp177.722.722.000,-**.

III.3.2.2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2022

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada tahun 2022 yang sudah di analisis per Triwulan II, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 32 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan IV 2022

	PAGU ALOKASI TRIWULAN I	TRIWULAN I		PAGU ALOKASI TRIWULAN II	TRIWULAN II		PAGU ALOKASI TRIWULAN III	TRIWULAN III		PAGU ALOKASI TRIWULAN IV	TRIWULAN IV	
		REALISASI	%		REALISASI	%		REALISASI	%		REALISASI	%
Belanja Pegawai	22.104.607.000	5.820.052.287	26,33	22.104.607.000	13.384.051.459	60,55	23.046.595.000	17.854.804.752	77,47	24.311.270.000	24.296.843.024	99,94
Belanja Barang	94.205.272.000	8.066.941.325	8,56	94.087.272.000	46.835.573.099	49,78	90.074.763.000	66.057.134.432	73,34	98.692.708.000	98.691.917.107	100,0
· RM	91.450.972.000	8.066.941.325	8,82	91.332.972.000	46.835.573.099	51,28	87.320.463.000	66.057.134.432	75,65	95.938.408.000	95.937.626.007	100,00
· PNPB	2.754.300.000	-	-	2.754.300.000	-	-	2.754.300.000	-	-	2.754.300.000	2.754.291.100	100,00
Belanja Modal	53.689.454.000	7.081.184.809	13,19	53.807.454.000	18.881.516.517	35,09	53.463.744.000	44.921.004.213	84,02	54.718.744.000	54.718.547.642	100,0
· RM	37.388.091.000	7.081.184.809	18,94	37.506.091.000	15.949.324.104	42,52	37.162.381.000	33.240.838.409	89,45	38.417.381.000	38.417.188.192	100,00
· PNPB	16.301.363.000	-	-	16.301.363.000	2.932.192.413	17,99	16.301.363.000	11.680.165.804	71,65	16.301.363.000	16.301.359.450	100,00
· SBSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	169.999.333.000	20.968.178.421	12,33	169.999.333.000	79.101.141.075	46,53	166.585.102.000	128.832.943.397	77,34	177.722.722.000	177.707.307.773	99,99

Berdasarkan data di atas dapat diketahui realisasi anggaran per jenis belanja Tahun 2023 mencapai 99,99% atau sebesar Rp177.707.307.773 dari Pagu Alokasi Anggaran sebesar Rp177.722.722.000.

III.3.2.4. Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja

Berikut merupakan data dari dana yang tidak terserap oleh unit kerja berdasarkan per jenis belanja, per sumber dana, dan sisa anggaran pada tahun 2023 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.33 Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
1	Belanja Pegawai	24.311.270.000	24.296.843.024	14.426.976
2	Belanja Barang	98.692.708.000	98.691.917.107	790.893
3	Belanja Modal	54.718.744.000	54.718.547.642	196.358
TOTAL		177.722.722.000	177.707.307.773	15.414.227

Tabel III. 34 Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2023

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
1	RUPIAH MURNI	158.667.059.000	158.651.657.223	20.790.720
2	PNBP	19.055.663.000	19.055.650.550	12.450
3	SBSN	-	-	-
TOTAL		177.722.722.000	177.707.307.773	15.414.227

2) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan sasaran program per Triwulan IV Tahun 2022, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.35 Efisiensi anggaran

NO.	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
		% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi Triwulan I	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi Triwulan II	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi Triwulan IV	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi Triwulan IV
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	63.20%	41.38%	21.82%	72.00%	67.43%	4.57%	89.07%	73.35%	15.72%	100.00%	100.00%	0.00%
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	33.74%	33.09%	0.66%	63.08%	80.11%	-17.03%	80.63%	84.93%	-4.30%	98.41%	100.00%	-1.59%
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	51.83%	23.86%	27.97%	58.83%	25.14%	33.70%	112.83%	48.53%	64.30%	97.45%	99.99%	-2.54%
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	8.89%	34.66%	-25.77%	51.67%	58.57%	-6.90%	75.56%	77.50%	-1.95%	100.00%	100.00%	0.00%
SK1	Meningkatnya Birokrasi Dijten Perhubungan Darat Akuntabel	27.65%	133.33%	-105.68%	68.82%	164.74%	-95.91%	80.00%	99.09%	-19.09%	100.00%	99.95%	0.05%
TOTAL		37.06%	53.26%	-16.20%	62.88%	79.20%	-16.32%	87.62%	76.68%	10.94%	99.17%	99.99%	-0.82%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 99,17%, dengan realisasi anggaran sebesar 99,99% menunjukkan adanya efisiensi antara rata-rata kinerja dengan rata-rata keuangan sebesar 0,82%.

3) Hambatan dan Kendala

Dalam perjalanannya, pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 tidak mengalami hambatan kendala yang terlalu signifikan. Beberapa Hambatan/Kendala yang ada antara lain masih rendahnya realisasi daya serap anggaran antara lain adanya *automatic adjustment* pada beberapa alokasi anggaran sehingga berdampak pada pengurangan dan pengalihan alokasi anggaran untuk kegiatan lain, serta tidak dapat terselenggaranya beberapa kegiatan.



BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

Ringkasan Capaian

Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Prov. Sumatera Selatan dan Bangka Belitung serta pengolahan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Kegiatan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya organisasi pemerintahan yang professional dan akuntabel.

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 dapat disampaikan hal-hal berikut:

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Renstra Tahun 2020-2024, yakni merupakan pelaksanaan tahun ketiga, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan Tahun 2023 ini secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik, dengan hasil terdapat 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$) dan 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq IKK < 100\%$) dari 5 (lima) sasaran yang telah ditetapkan. Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada LKIP Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
 - a. Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan terealisasi sebesar 100,0 (target 100,0);
 - b. Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda terealisasi sebesar 1,0 (target 1,0);
 - c. Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi terealisasi sebesar 7,0 (target 7,0);
 - d. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan terealisasi sebesar 100,0 (target 100,0);
 - e. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi sebesar 3,0 (target 3,0);
 - f. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A sebesar terealisasi sebesar 100,0 (target 100,0);
 - g. Persentase penerapan SMART terminal tipe-A terealisasi sebesar 57,14 (target 60,0);
 - h. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP terealisasi sebesar 100,0 (target 100,0);
 - i. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi sebesar 80,0 (target 80,0);

- j. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 11,69 (target 10,0);
 - k. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi sebesar 1200,0 (target 1200,0);
 - l. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terealisasi sebesar 83,33 (target 80,0);
 - m. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP terealisasi sebesar 1,0 (target 1,0);
 - n. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terealisasi sebesar 90,0 (target 90,0); dan
 - o. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 85,0 (target 85,0).
2. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan senantiasa meningkatkan koordinasi baik dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju pemerintahan yang professional, akuntabel, transparan, serta efektif dan efisien dengan pelayanan yang prima;
 3. Nilai Kinerja Organisasi dengan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran kegiatan adalah sebesar 99,17%, dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024.

IV.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET DALAM PIK	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
					TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100	100	100%	TERCAPAI	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut.	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani Subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1	1	1	100%	TERCAPAI	Melayani masyarakat di simpul transportasi nasional melalui subsidi angkutan antarmoda dan di kawasan yang menjadi Prioritas Nasional (PN) untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut.	- Seksi Sarana
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7	7	7	100%	TERCAPAI	Memastikan dan memonitor pelaksanaan Terminal Tipe-A yang telah beroperasi mendapatkan dukungan operasional SDM dan anggaran	- Seksi Prasarana
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan Angkutan penyeberangan	%	100	100	100	100%	TERCAPAI	Memastikan dan memonitor pelaksanaan Pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan telah	- Seksi Lalin - Seksi Sarana

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
					TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA				
									mendapatkan dukungan SDM dan anggaran.	- Seksi Prasarana	
		IKK1.6	Jumlah pelebuhuan SDP yang beroperasi	Lokasi	3	3	3	100%	TERCAPAI	Memastikan dan memonitor pelaksanaan Pelebuhuan SDP yang telah beroperasi telah beroprasi mendapatkan dukungan operasional SDM	- Seksi Prasarana
2	SK2	Meningkatnya Pelayanan transportasi darat									- Seksi Prasarana
		IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	100	100	100%	TERCAPAI	Memastikan dan memonitor pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum di Terminal Tipe A telah berjalan dan mendapatkan dukungan SDM dan anggaran	- Seksi Prasarana
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	60	60	57,14	93,23%	KURANG TERCAPAI	Memastikan dan memonitor penerapan SMART Terminal Tipe A telah berjalan dan mendapatkan dukungan SDM dan anggaran.	- Seksi Prasarana
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelebuhuan SDP	%	100	100	100	100%	TERCAPAI	Memastikan dan memonitor pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum di Pelebuhuan SDP telah berjalan dan mendapatkan dukungan SDM dan anggaran	- Seksi Prasarana
3	SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi darat									- Seksi Lain
		IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah Terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	80	80	100%	TERCAPAI	Memastikan dan memonitor perlengkapan jalan yang telah Terpasang terhadap kondisi ideal telah berjalan dan	- Seksi Lain

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
					TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	10	10	11,69	83,10%	TIDAK TERCAPAI	Memonitor secara berkala pelaksanaan pelanggaran di UPPKB yang beroperasi dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar ketentuan penimbangan	- Seksi Lalin
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang Keselamatan transportasi jalan	Orang	1200	1200	1200	100%	TERCAPAI	Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait keselamatan transportasi jalan melalui semua media sosial dan kampanye keselamatan transportasi jalan	- Seksi Sarana
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala Kendaraan bermotor	%	80	80	83,33	104,16%	TERCAPAI	Meningkatkan pelaksanaan standarisasi pengujian berkala Kendaraan bermotor melalui kegiatan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) ke semua Pemda Prov/Kab/Kota	- Seksi Sarana
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur Pelayanan SDP	Lokasi	1	1	1	100%	TERCAPAI	Memastikan dan memonitor pelaksanaan kegiatan fasilitas keselamatan alur Pelayanan SDP	- Seksi Lalin
4	SK5 Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan dukungan teknis	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	90	90	100%	TERCAPAI	Memastikan dan memonitor penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat telah	- Seksi Lalin - Seksi Sarana

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
					TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
	transportasi darat								berjalan dan mendapatkan dukungan SDM dan anggaran	- Seksi Prasarana - Sub Bagian Tata Usaha
5	SK1 Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel	IKK 1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85	85	85	100%	TERCAPAI	Memastikan dan memonitor penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat telah berjalan dan mendapatkan dukungan SDM dan anggaran	- Sub Bagian Tata Usaha